



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 144/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SAROLANGUN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MUARO JAMBI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN FAK FAK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SAMOSIR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN JENEPONTO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SELASA, 14 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Ari Wibowo dan Azwar Sazali Tanjung

PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024
- Pemohon: Tontawi Jauhari dan A. Harris Ab.

PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Djein Leonora Rende dan Ascke Alexander Benu

PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024
- Pemohon: Zuwanda dan Sawaluddin

PERKARA NOMOR 144/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Fak Fak Tahun 2024
- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Fak Fak Tahun 2024
- Pemohon: Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom

PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024
- Pemohon: Freddy Lamhot P. Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon

PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby

PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024
- Pemohon: Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin

PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024
- Pemohon: Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Selasa, 14 Januari 2025, Pukul 07.56 – 10.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Muchtar Hadi Saputra
2. Muhammad Reza Winata
3. Hersinta Setiarini

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Tri Sandi Muji Areza
2. Agussyah Ramadani D.

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sigit Brothers
2. Riza Fahlevi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yohanes Muaja

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU. BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Deddy Yuliansyah

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Iqbal Sumarlan Putra
2. Junaedi Rano Wiradinata

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 214/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Martua Henry Siallagan
2. Hendro Jintar Muliadi Sihaloho

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 232/PHPU. BUP-XXIII/2025:

1. Anas Malik
2. Eko Saputra

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Julianto Asis
2. Rendy Saputra

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 272/PHPU. BUP-XXIII/2025:

1. AH. Wakil Kamal
2. Siti Fatonah Nur Hidayah

J. Termohon:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Adnan Rasyid | (KPU Kab. Labuhanbatu Selatan) |
| 2. Ahmad Mujaddid | (KPU Kab. Sarolangun) |
| 3. Otnie Nolfie Tamod | (KPU Kab. Minahasa Tenggara) |
| 4. Almuttaqin | (KPU Kab. Muaro Jambi) |
| 5. Hendra J. C. Talla | (KPU Kab. Fak Fak) |
| 6. Yossan Massa | (KPU Kab. Fak Fak) |
| 7. Vincentius A. M. Sitinjak | (KPU Kab. Samosir) |
| 8. Ilham Hidayat | (KPU Kab. Jeneponto) |
| 9. Dete Abugau | (KPU Kab. Mimika) |
| 10. Hironimus Kia Ruma | (KPU Kab. Mimika) |

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Abdur Rozzak Harahap
2. Enda Permata Sari
3. Andre Kristian
4. Nurhidayat
5. Dahlan Pido
6. Arnoldus Alo Lengka
7. Josua Victor
8. Abdillah Zikri Natsir
9. M. Fadly Abd Rachman
10. Afif Rosadiansyah

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Sofyan Hussein Rambe
2. Itok Suhendra

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yuskandar
2. Dimas Amanda Wahid

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Denny Frankie Kaunang
2. Jelij F. B. Dondokambey

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Maiful Efendi
2. Edy Syams

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Janses E. Sihaloho
2. M. Yasin Djamaludin

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 214/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hutur Irvan V. Pandiangan
2. Friska J. M. Gultom

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Saiful
2. Arifuddin

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marvey J. Dangeubun
2. Welly Rondonuwu Goha

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Supriyadi
2. Emilia S. Lawalata

U. Bawaslu:

1. Ependi Pasaribu (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan)
2. Rido Akmal Nasution (Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan)
3. Aspriadi (Bawaslu Kab. Sarolangun)
4. Johan Iswadi (Bawaslu Kab. Sarolangun)
5. Mario Gerson Lontaan (Bawaslu Kab. Minahasa Tenggara)
6. Jerum Jobie Longkutoy (Bawaslu Kab. Minahasa Tenggara)
7. Dedi Wahyudi (Bawaslu Kab. Muaro Jambi)
8. Elfi Prasetia (Bawaslu Kab. Muaro Jambi)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 9. Elias Idie | (Bawaslu Prov. Papua Barat) |
| 10. Siofanus Irfam Kareth | (Bawaslu Kab. Fak Fak) |
| 11. Arifin Takamokan | (Bawaslu Kab. Fak Fak) |
| 12. Syahril Radal Serbunit | (Bawaslu Kab. Fak Fak) |
| 13. Johan Alamsyah | (Bawaslu Prov. Sumut) |
| 14. Jonsen Situmorang | (Bawaslu Kab. Samosir) |
| 15. Robinson Simarmata | (Bawaslu Kab. Samosir) |
| 16. Muhammad Alwi | (Bawaslu Kab. Jeneponto) |
| 17. Eric Fhatur Rahman | (Bawaslu Kab. Jeneponto) |
| 18. Arfah | (Bawaslu Kab. Mimika) |
| 19. Yusuf Herru Sraun | (Bawaslu Kab. Mimika) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.56 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang untuk Perkara 77, 86, 214, 232, 139, 144, 188, 256, 272, dan Nomor 33 PHPU Bupati Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Hari ini kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda Pendahuluan, Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Para Pemohon. Jadi, ini ada 10 nomor untuk pagi ini sampai siang, dan kita tidak akan memperkenalkan satu per satu, karena itu akan menghabiskan cukup waktu, nanti akan berjalan sesuai dengan giliran masing-masing. Yang pertama.

Yang kedua, perlu diingatkan, yang disampaikan Pemohon adalah pokok-pokoknya saja dengan waktu maksimal 15 menit masing-masing permohonan, waktu maksimalnya 15 menit. Yang disampaikan adalah apa yang dituliskan dalam Permohonan yang diregistrasi. Apakah itu Permohonan Awal ataupun Perbaikan Permohonan karena ada yang menyerahkan Permohonan Awal, tapi tidak memperbaiki Permohonan. Maka yang digunakan adalah Permohonan Awal itu.

Jika ... nah ini, untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, jika terdapat hal yang disampaikan oleh Pemohon berbeda dengan apa yang ada dalam Permohonan tertulis, maka yang digunakan adalah yang tertulis. Oke, itu. Jadi enggak ada pertanyaan soal itu lagi.

Jadi diingatkan kepada ... apa ... kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan apa yang tertulis. Jangan nanti setelah tahu sadar ada yang salah, lalu secara lisan diperbaiki, maka yang akan digunakan tetap yang ada di naskah Perbaikan Permohonan atau Permohonan yang diregistrasi.

Yang terakhir, diberitahukan kepada semua, mulai dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, tolong optimalkan bukti-bukti. Semuanya harus pasang asumsi, terutama Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait bahwa ini tidak akan lanjut ke pembuktian, lanjutan, sehingga dioptimalkan bukti-bukti pada tahapan ini. Nanti kalau kami merasa perlu dilanjutkan karena ada yang harus dialami segala macam, baru dilanjutkan, tapi jangan berpikir, "Ah, nanti bukti kami di pembuktian berikutnya saja." Nah, itu agak kacau kalau begitu, ya. Jadi tolong dioptimalkan bukti-bukti.

Yang terakhir, ini perlu di ... apa ... disampaikan. Kalau ada yang mau menyerahkan bukti, kalau di sini bukti tambahan, kalau di sini mau menyerahkan bukti, Pihak Terkait, dan Bawaslu, tolong sampaikan menjelang persidangan berikutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, supaya kami bisa memverifikasi dan kemudian mengesahkan itu dalam persidangan. Sebab kalau tidak disahkan dalam persidangan, maka tidak ada kekuatan apa pun dari bukti yang disampaikan itu.

Yang terakhir, di luar Pemohon, tidak ada yang interupsi, baik Termohon, Pihak Terkait, kalau Bawaslu lebih tertib, enggak ada interupsi biasanya. Itu diingatkan, nanti akan ada sesi terakhir. Saya tanya, "Ada yang mau mengajukan pertanyaan, 1, 2?"

Bisa dipahami, ya? Termohon dan Pihak Terkait?

Oke, dengan begitu, kita mulai sekarang kepada Perkara Nomor 77 dari Kabupaten Sarolangun. Silakan, Kuasa Hukumnya, sampaikan pokok-pokok Permohonan saja.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [04:35]

Baik, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [04:37]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [04:39]

Izin, Yang Mulia.

Saya Riza Fahlevi, Kuasa Hukum dari Pemohon Nomor Perkara 77 dan kolega saya, yaitu Sigit Brothers, S.H., M.H. Izin membacakan Permohonan yang kami ajukan, pokok-pokoknya saja.

5. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [04:59]

Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun.

Kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini, Paslon Tontawi Jauhari dan Haris, A.B., M.M. Merupakan Pasangan Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 3/SBP.LF/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, memberikan kuasa kepada Sigit Brothers, S.H., M.H. dan Riza Fahlevi, S.H.

Langsung saja pada pokok-pokoknya, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [05:43]

Ya. Terus?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [05:44]

Baik, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon.

9. KETUA: SALDI ISRA [05:48]

Eenggak usah maksud dan tujuan itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [05:50]

Baik. Bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan untuk melakukan Pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [06:03]

Kalau begitu, saya pandu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [06:03]

Baik.

13. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Ini Kewenangan Mahkamah berwenang, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [06:07]

Berwenang, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Oke. Tenggat waktu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [06:10]

Tenggat waktu, saya bacakan, Yang Mulia?

17. KETUA: SALDI ISRA [06:15]

Apa yang mau dibacakan? Kapan ini ditetapkan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [06:18]

Pada tanggal 3, Yang Mulia (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

3 (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [06:24]

3 Desember 2024. Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:25]

3 Desember 2024, itu berarti hari apa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [06:27]

Hari Selasa, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [06:28]

Selasa. Kapan ini Permohonan diajukan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [06:33]

Permohonan diajukan pada tanggal 6, pada hari Jumat, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:40]

Oke. Oke, lanjut!

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [06:42]

Baik, untuk (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Kedudukan Hukum?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [06:45]

Kedudukan Hukum, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Dianggap sudah dibacakan. Ini berapa selisih suara? Berapa pasangan calon di situ?

30. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [06:51]

5 pasangan calon, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:52]

5 pasangan calon.
Peraih suara terbanyak, pasangan calon berapa?

32. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [06:55]

Pasangan Calon Nomor 05, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:57]

05. Berapa suaranya? Karena ini Permohonan suara tidak dituliskan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [07:03]

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:05]

Berapa suaranya Hurmin, Gerry Trisatwika itu?

36. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [07:08]

73.000 ... 70 lebih, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:14]

Ya, berapa itu?
KPU berapa suaranya nih? KPU Sarolangun? Ada KPU Sarolangun?

38. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [07:22]

Ada. Mohon izin, Yang Mulia (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [07:23]

Berapa suara nomor 05?

40. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [07:25]

78.525.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:27]

78.525. Oke, Pemohon nomor urut berapa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [07:32]

Nomor 03, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:34]

03. Berapa suaranya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [07:38]

30.000 lebih, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:39]

Berapa=30.000-nya? Anda ini kalau jadi lawyer itu harus siap!

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [07:44]

Siap, Yang Mulia. 30.000 (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

KPU berapa suaranya Nomor 03?

48. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [07:49]

22.172.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Jauh sekali bedanya, 22.000 ... berapa?

50. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [07:59]

22.172

51. KETUA: SALDI ISRA [08:01]

172[sic!], ini peraih suara nomor berapa?

52. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [08:06]

Nomor 03.

53. KETUA: SALDI ISRA [08:07]

Maksud saya itu, suara urutannya nomor berapa?

54. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [08:10]

Tetap Nomor 3, Yang Mulia (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Oh, tetap Nomor 3, ya? Oke. Kalau Nomor 2-nya siapa?

56. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [08:16]

Hilalatil Badri dan Aang Purnama.

57. KETUA: SALDI ISRA [08:20]

Berapa suaranya?

58. TERMOHON: AHMAD MUJADDID [08:22]

50.068.

59. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

50.068, oke. Pemohon silakan, Kuasa.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [08:30]

Baik, Yang Mulia, izinkan kami untuk (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Ini kalau gunakan 158, tidak lewat, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [08:36]

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [08:36]

Nah, sekarang Anda kan minta di kesampingkan itu?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [08:37]

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [08:38]

Apa alasannya? Cepat sampaikan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [08:40]

Baik, izin membacakan, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan pembatalan yang dimajukan[sic!] Pemohon, terhadap objek perselisihan a quo adalah sebagai berikut.

Yang pertama, keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang mendukung salah satu pasangan calon.

Kemudian yang kedua, ketidaknetralan kepala desa dan perangkat desa yang mendukung salah satu pasangan calon.

Nomor 3, terjadi politik uang yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Yang keempat, fasilitas pendidikan dijadikan tempat atau lokasi kampanye.

Kemudian yang kelima, adanya daftar pemilih ganda.

67. KETUA: SALDI ISRA [09:08]

Oke, apa yang mau dijelaskan? Silakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [09:08]

Baik, izin, Yang Mulia. Banyaknya terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarolangun dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

69. KETUA: SALDI ISRA [09:18]

Berapa banyaknya itu?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [09:20]

Terjadi di 6 kecamatan, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [09:24]

6 kecamatan, berapa kecamatan di Sarolangun?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [09:25]

Ada 11, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Ada 11, jadi limanya tidak terjadi apa-apa, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [09:29]

Limanya juga terindikasi, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Oh, oke.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [09:30]

Namun yang kami ajukan itu 6, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [09:32]

Tapi yang diajukan 6?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [09:33]

Ya, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [09:34]

Oke. Apa saja itu, bentuk pelanggarannya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [09:39]

Baik, yang pertama ... izin, Yang Mulia.

Bahwa sebelum (ucapan tidak terdengar jelas), Pemohon menyampaikan bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Saksi Pasangan Calon 03 dan Saksi Pasangan 04, mengajukan keberatan yang dituangkan dalam form, (ucapan tidak terdengar jelas) khusus yang ditandatangani 03.

Bahwa selanjutnya (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [09:55]

Ini, di mana ini keberatannya, di TPS atau di kecamatan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [09:59]

Di kabupaten, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [10:00]

Oh, di kabupaten?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:01]

Pleno Kabupaten, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [10:02]

Di ... di TPS ada yang keberatan enggak, Saksi Nomor 3?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:05]

Di TPS tidak, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [10:07]

Oh, tidak. Oke, lanjut.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:08]

Baik. Satu, ketidakprofesionalan Termohon dalam melakukan distribusi surat suara (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [10:12]

Apa itu, tidak profesionalnya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:14]

Bahwa jumlah DPT, kemudian ditambahkan dengan jumlah cadangan itu lebih, Yang Mulia, dari sesuai dengan aturannya, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Tadi tidak profesional soal surat suara?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:26]

Ya.

93. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Nah, apa yang tidak profesional?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:29]

Bahwasanya, jumlah DPT di Kabupaten Sarolangun itu yaitu=214.042 (...)

95. KETUA: SALDI ISRA [10:39]

Ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:40]

DPT. Kemudian, kalau ditambah dengan 2,5% surat suara cadangan, harusnya=217,394[sic!], Yang Mulia. Namun (...)

97. KETUA: SALDI ISRA [10:49]

Oke, berapa kelebihanannya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:50]

Kelebihannya 229 surat suara, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [10:55]

229 surat suara?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:56]

Ya.

101. KETUA: SALDI ISRA [10:57]

Oke.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [10:58]

Bahwa berdasarkan Alat Bukti di atas, terbukti dan tak terbantahkan bahwa Termohon telah tidak profesional dalam melakukan pendistribusi surat suara.

103. KETUA: SALDI ISRA [11:03]

Oke.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [11:04]

Yang kedua, keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang mendukung salah satu ca ... pasangan calon.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu dalam Peraturan tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya yang dibuat oleh Penyelenggara Pemilu, maupun dalam Peraturan Internal Aparatur Sipil Negara (ASN) telah sangat tegas menyarankan Aparatur Sipil Negara, harusnya tidak memihak pada salah satu pasangan calon.

105. KETUA: SALDI ISRA [11:24]

Ini berapa banyak ASN yang ... yang memihak itu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [11:28]

Ada camat, Yang Mulia, kemudi (...)

107. KETUA: SALDI ISRA [11:31]

Bukan. Berapa banyak semua?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [11:32]

ASN yang terlibat, Yang Mulia?

109. KETUA: SALDI ISRA [11:34]

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [11:36]

Kalau yang terlibat, izin, Yang Mulia, kita yang ... kita buktikan di pembuktian kita, di data terbukti kita ada 6 camat, kemudian (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [11:43]

6 camat.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [11:45]

Kemudian, ada juga kepala dinas.

113. KETUA: SALDI ISRA [11:46]

Ya. Siapa camatnya dan kepala dinasnya, itu di mana ditulis?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [11:50]

Ada, Yang Mulia, di halaman 12, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Oke.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [11:54]

Ada camat di situ.

117. KETUA: SALDI ISRA [11:55]

Oke.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [11:56]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Ya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [11:57]

Camat di 6 kecamatan, mendukung Pasangan satu ... Pasangan Calon Nomor 5, yakni Camat Pauh, Camat Sarolangun, Camat Batin VIII, Mandiangin Timur, Mandiangin, dan Air Hitam.

121. KETUA: SALDI ISRA [12:07]

Oke.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [12:00]

3. Ketidaknetralan kepala desa dan perangkat desa yang mendukung salah satu pasangan calon.

123. KETUA: SALDI ISRA [12:13]

Oke.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [12:14]

Adapun ketidaknetralan tersebut, kepala desa menawarkan kepada warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 agar

mendapatkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

125. KETUA: SALDI ISRA [12:23]

Oke.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [12:24]

2) Kepala Desa mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5 dengan intimidasi-intimidasi.

3) Kepala Desa Seko Besar mencoret warga masyarakat dari daftar penerima Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor 5.

127. KETUA: SALDI ISRA [12:38]

Kapan dicoretnya itu?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [12:39]

Pada waktu setelah pemilihan, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Oke, bagaimana dia tahu orang tidak memilih 05 itu?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [12:45]

Bagaimana, Yang Mulia?

131. KETUA: SALDI ISRA [12:46]

Bagaimana caranya dia tahu itu, apa itu kepala desa itu? Ini tidak memilih 05.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [12:55]

Ya, informasi kita di lapangan bahwasanya yang pelaku ... apa namanya ... korban tersendiri itu mengaku, Yang Mulia. Intimidasi.

133. KETUA: SALDI ISRA [13:02]

Oke, lanjut.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [13:03]

Baik, terjadinya politik uang yang mengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Bahwa telah terjadi cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menarik simpati dan mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya pada pasangan calon.

135. KETUA: SALDI ISRA [13:15]

Bagaimana? Berapa uang yang dibagikan? Siapa yang membagikan?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [13:17]

Baik, Yang Mulia, izin. Ada pada bukti kita, pada Bukti P-2. Itu oleh Ketua Tim Pemenangan itu membagikan uang secara langsung dalam nominal Rp50.000,00 itu kepada masyarakat secara langsung.

137. KETUA: SALDI ISRA [13:33]

Berapa banyak masyarakat yang menerima?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [13:35]

Ada itu dalam satu desa, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [13:37]

Satu desanya menerima semua?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [13:38]

Yang sebagian, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [13:39]

Oh, oke. Itu hati-hati Anda ngomongnya. Satu desa itu nanti (...)

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [13:41]

Ya.

143. KETUA: SALDI ISRA [13:42]

Oke, apa lagi?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [13:43]

Baik, kemudian yang kelima, fasilitas pendidikan dijadikan tempat lokasi kampanye. Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye di Pondok Pesantren Nurul Jadid yang berlokasi di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut. Hal tersebut melanggar PKPU Nomor 13.

145. KETUA: SALDI ISRA [13:59]

Oke.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:00]

Kemudian yang terakhir, adanya daftar pemilih ganda. Bahwa di TPS 01 Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam terdapat daftar pemilih ganda yang memberikan suaranya lebih dari satu kali, Bukti P-8.

147. KETUA: SALDI ISRA [14:12]

Berapa orang yang melakukan pemilihan ganda itu?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:17]

Itu dalam ... di DPT-nya semuanya, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [14:19]

Bukan. Kan di DPT itu ada ganda kata Anda, kan?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:21]

Ya.

151. KETUA: SALDI ISRA [14:22]

Yang menggunakan hak pilih dari yang ganda itu berapa orang?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:24]

Lebih dari 30 orang, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [14:25]

Lebih dari 30 orang?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [24:26]

Ya.

155. KETUA: SALDI ISRA [14:27]

Di satu ... di satu TPS?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:28]

Di satu TPS, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [14:29]

Oke, lanjut. Langsung Kesimpulan, ya.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:31]

Baik. Izin, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [14:32]

Atau langsung Petikum saja, langsung Petikum? Kan kesimpulan Anda itu kan bermuara pada Petikum, kan?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:48]

Ya, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [14:49]

Silakan.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:50]

Karena di kesimpulan kami lah, di situ terdapat TSM-nya, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [14:52]

Itu sudah kita lihat.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:53]

Baik.

165. KETUA: SALDI ISRA [14:54]

Langsung Petitum.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:55]

Baik. Izin disampaikan oleh kolega saya, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [14:56]

Silakan.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZA FAHLEVI [14:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [14:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah Pemohon sebutkan di atas, maka dengan segenap kerendahan hati Pemohon, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar ... amarnya sebagai berikut.

Mengabulkan seluruh Petitum Pemohon ... Permohonan Pemohon.
Mengabulkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun nomor (...)

170. KETUA: SALDI ISRA [15:34]

Membatalkan.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [15:35]

Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun tanggal 3 Desember 2024.

172. KETUA: SALDI ISRA [15:48]

Oke. Terus.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [15:50]

Yang ketiga. Mendis ... mendiskualifikasikan Pasangan Calon 05 dari Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.

174. KETUA: SALDI ISRA

Terus.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [16:03]

Yang ke-4, memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah hukum Kabupaten Sarolangun pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05.

Terima kasih, Ketua Majelis.

176. KETUA: SALDI ISRA [16:22]

Terima kasih. Cukup, ya?

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Cukup, Yang Mulia?

177. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:28]

Sedikit saja. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saudara Kuasa Pemohon, ya. Itu di halaman 14 itu, coba lihat Saudara, alinea kedua itu. Di disk lup ... apa ... didiskualifikasinya itu kan Calon Nomor 4 ya, Paslon 4, dan juga di sini bawah lagi, PSU tanpa diikuti oleh Paslon 5, ya? Coba lihat itu berikutnya, itu di halaman berikutnya di Petitum itu. Diskualifikasi Pasangan Nomor 5 dan juga tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor 5, ya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [17:17]

Ya, Yang Mulia. Itu salah ketik kami.

179. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:17]

Nah, itu. Baik. Tenggat waktunya cukup ya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [17:28]

Cukup, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:29]

Tanggal, berapa diumumkan?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [17:32]

Tanggal 3.

183. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:32]

Tanggal 3, pukul?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [17:35]

Pukul 16.26.

185. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:35]

Nah, permohonannya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [17:39]

Tanggal 6, Yang Mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:41]

Tanggal 6, pukul?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHERS [17:43]

Pukul 14.00, Yang Mulia.

189. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR

14.00. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

190. KETUA: SALDI ISRA [17:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih ya, Kuasa Hukum Pemohon untuk Kabupaten Sarolangun.

Nomor 86, Ada Kuasa Hukumnya? Silakan.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

192. KETUA: SALDI ISRA [18:02]

Ya.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:07]

Baik, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (...)

194. KETUA: SALDI ISRA [18:14]

Ini Kabupaten Minahasa Tenggara, ya?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:16]

Minahasa Tenggara, Yang Mulia.
Komisi Pemilihan Hukum KPU Minahasa Tenggara Nomor 1195
Tahun 2024.

196. KETUA: SALDI ISRA [18:29]

Sebentar.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:30]

Siap, Yang Mulia.

198. KETUA: SALDI ISRA [18:36]

Ini soalnya ada surat masuk ke kami.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:39]

Ya, Yang Mulia.

200. KETUA: SALDI ISRA [18:40]

Ini siapa nama Kuasa Hukumnya ini?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:40]

Yohanes.

202. KETUA: SALDI ISRA [18:43]

Yohanes?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:43]

Ya.

204. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Ini, ada penarikan kembali Permohonan?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:46]

Dibatalkan, Yang Mulia. Dilanjutkan ke persidangan.

206. KETUA: SALDI ISRA [18:49]

Kapan dibatalkan penarikannya?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:49]

Tidak ... apa namanya Prinsipal tidak menyetujui, Pak.

208. KETUA: SALDI ISRA [18:51]

Bukan ... tapi Anda kan, sudah mengajukan surat?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [18:58]

Ya, dibatalkan dan (...)

210. KETUA: SALDI ISRA [19:00]

Surat pembatalannya mana?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [19:02]

Maksudnya dalam persidangan, Pak, disampaikan untuk melanjutkan (...)

212. KETUA: SALDI ISRA [19:06]

Pembatalan atas penarikan itu mana?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [19:08]

Belum dibuat, Yang Mulia.

214. KETUA: SALDI ISRA [19:10]

Eh, Bagaimana Anda lawyer ini? Itu mempermainkan Mahkamah namanya.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [19:16]

Siap, Yang Mulia.

216. KETUA: SALDI ISRA [19:16]

Ini resmi Anda mengirim Surat Menarik Permohonan ini, tapi tiba-tiba dibatalkan, tanpa ada surat pembatalan?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [19:21]

Siap, Yang Mulia.

218. KETUA: SALDI ISRA [19:26]

Apanya yang siap?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [19:27]

Nanti disampaikan suratnya, Yang Mulia.

220. KETUA: SALDI ISRA [19:31]

Kenapa Anda mengajukan surat, tidak berkomunikasi dengan Prinsipal?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [19:36]

Mohon maaf, Yang Mulia. Untuk pengajuan surat tersebut disampaikan oleh salah satu dari Kuasa Hukum dan ini kita akan

mengajukan surat pencabutan kuasa, Yang Mulia, untuk yang kuasa hukum sebelumnya.

222. KETUA: SALDI ISRA [19:50]

Atas nama siapa?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [19:52]

Atas nama Alfianus A. Boham, Wensy Wengke, sama Agus Tawas.

224. KETUA: SALDI ISRA [19:52]

Ini, enggak ada di sini. Ini, Yohanes, Anda tanda tangan, kan?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [20:07]

Ya, Yang Mulia.

226. KETUA: SALDI ISRA [20:10]

Jangan Anda mempersalahkan yang lain, Anda tanda tangan di surat ini lho.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [20:12]

Siap, Yang (...)

228. KETUA: SALDI ISRA [20:13]

Penarikan.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [20:15]

Dan itu menurut Prinsipal untuk dibatalkan dan dilanjutkan Persidangan, Yang Mulia.

230. KETUA: SALDI ISRA [20:18]

Tapi kami tidak punya bukti itu.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [20:21]

Baik, Yang Mulia, nanti disampaikan ... kemudian jika Yang Mulia berkenan (...)

232. KETUA: SALDI ISRA [20:26]

Oke, terserah nanti Termohon dan Pihak Terkait merespons ya, ini faktanya sudah kita sampaikan. Silakan.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [20:32]

Siap, Yang Mulia.

234. KETUA: SALDI ISRA [20:35]

Suratnya belum ada Anda tarik sampai sekarang, ya?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [20:37]

Belum ada, Yang Mulia.

236. KETUA: SALDI ISRA [20:40]

Silakan.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [20:42]

Dilanjutkan, Yang Mulia.

238. KETUA: SALDI ISRA [20:46]

Ini Anda kayak tidak tahu aturan saja, sudah ditarik, tidak dibatalkan penarikannya, tiba-tiba muncul ke sini. Apa mengganggu-gangguan begitu? Makanya jadi lawyer itu harus paham lho, konsekuensi apa pun yang dimasukkan ke pengadilan itu.

Silakan!

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [21:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Djein Rende dan Ascke Benu, melalui Kuasa Hukumnya Yohanes Muaja dan kawan-kawan sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Termohon.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk Kedudukan Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pada intinya, kami memohon kepada Mahkamah untuk mengenyakan ... mengenyampingkan Pasal 158, Yang Mulia.

Untuk tenggat waktu permohonan, menurut Pemohon masih dalam tenggat waktu yang memenuhi ketentuan, Yang Mulia.

240. KETUA: SALDI ISRA [22:00]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [22:02]

Pokok-Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon adalah pasangan calon tetap sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3.

242. KETUA: SALDI ISRA [22:22]

Nomor Urut 3, ya?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [22:23]

Ya, Yang Mulia.

244. KETUA: SALDI ISRA [22:26]

Yang peraih suara terbanyaknya nomor urut berapa?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [22:27]

Nomor Urut 1, Yang Mulia.

246. KETUA: SALDI ISRA [22:29]

Oke, Ini selisihnya hampir 3 ... 27 ribu, ya?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [22:37]

Ya, Yang Mulia.

248. KETUA: SALDI ISRA [22:39]

Betul. Oke, apa alasannya ini? Apa yang terjadi?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [22:42]

Ya, lanjut, Yang Mulia. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

250. KETUA: SALDI ISRA [22:48]

Ya, ini Anda kan mau menerobos Pasal 158. Apa alasannya?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [22:51]

Ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran, Yang Mulia.

252. KETUA: SALDI ISRA [22:57]

Apa pelanggarannya?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [22:59]

Yang pertama, bahwa ada keterlibatan birokrasi juga terhadap Aparatur Sipil Negara. Foto bersama calon Bupati Nomor Urut 1.

254. KETUA: SALDI ISRA [23:10]

Kapan fotonya?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [23:12]

Tanggal 27, Yang Mulia.

256. KETUA: SALDI ISRA [23:13]

27 apa?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [23:14]

November.

258. KETUA: SALDI ISRA [23:15]

27 November.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [23:15]

Ya.

260. KETUA: SALDI ISRA [23:16]

27 November, itu kan sudah pemungutan suara.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [23:19]

Ya, Yang Mulia.

262. KETUA: SALDI ISRA [23:20]

Apa lagi?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [23:23]

Kemudian, bahwa telah terjadi politik uang yang masif di Kabupaten Minahasa Tenggara.

264. KETUA: SALDI ISRA [23:28]

Seberapa masif?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [23:29]

Tangkap tangan, Yang Mulia yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Tombatu dan pihak Panwas Kecamatan Tombatu terhadap salah satu Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 1, Ronald Kandoli dan Fredy Tuda.

266. KETUA: SALDI ISRA [23:43]

Lanjut. Apa lagi?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [23:50]

Bahwa pada tanggal 25 November 2024, di Desa Towuntu Timur, Jaga 2, Kecamatan Pasan telah melakukan politik uang secara masif dalam amplop putih yang isinya uang senilai Rp300.000,00 (...)

268. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Berapa banyak amplopnya yang diketahui?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [24:03]

Banyak, Yang Mulia, lebih dari satu.

270. KETUA: SALDI ISRA [24:05]

Ya, berapa banyak? Sa ... dua itu banyak, hitung lebih dari satu itu banyak. Berapa jumlah amplopnya?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [24:10]

Tidak diketahui jumlahnya, Yang Mulia. Ada di bukti fot ... di bukti video, Yang Mulia.

272. KETUA: SALDI ISRA [24:14]

Oke, terus!

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [24:18]

Demikian, Yang Mulia.
Yang terakhir, masuk di Petitem, Yang Mulia.

274. KETUA: SALDI ISRA [24:20]

Oke, lanjut Petitem.

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [24:22]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sela ... seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, atas nama Ronald Kandoli dan Fredy Tuda, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Tenggara Tahun 2024.
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, atas nama Djein Leonora Rende dan Ascke Benu, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.
5. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

276. KETUA: SALDI ISRA [25:45]

Terima kasih. Anda sekarang bawa surat pembatalannya, enggak?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [25:48]

Tidak, Yang Mulia.

278. KETUA: SALDI ISRA [25:49]

Oke, gimana Anda lawyer, ya? Ini Anda ... Anda masuk ruang sidang ini ndak ... ndak absah ini sebetulnya.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [25:56]

Mohon maaf, Yang Mulia.

280. KETUA: SALDI ISRA [26:02]

Oke, cukup, ya?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: YOHANES MUAJA [26:05]

Cukup, Yang Mulia.

282. KETUA: SALDI ISRA [26:06]

Ada yang mau didalami, Yang Mulia Pak Arsul? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya. Terima kasih.
Berikut Nomor 214, Kabupaten Samosir.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [26:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

284. KETUA: SALDI ISRA [26:25]

Silakan!

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [26:25]

Izin, Yang Mulia.
Perkenalkan, nama Saya Martua Henry Siallagan dan rekan saya Hendro Sihaloho.

286. KETUA: SALDI ISRA [26:33]

Ya.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [26:34]

Selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Nomor Perkara 214.

288. KETUA: SALDI ISRA [26:32]

Oke.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [26:38]

Langsung saja ke pokok perkaranya, Yang Mulia.

290. KETUA: SALDI ISRA [26:41]

Kewenangan ada, ya? Tenggat waktu memenuhi atau tidak?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [26:45]

Izin, Yang Mulia, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [26:50]

Ya, tenggat waktunya terpenuhi atau tidak? Kapan ini di ... ditetapkan hasilnya?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [26:55]

Tanggal ... tanggal 6 Desember, Yang Mulia.

294. KETUA: SALDI ISRA [26:57]

6 itu hari apa?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [26:58]

Hari Jumat, Yang Mulia.

296. KETUA: SALDI ISRA [26:59]

Jumat.

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:01]

Sekitar Pukul 09.43 WIB.

298. KETUA: SALDI ISRA [27:03]

Oke, jadi 6, hari Jumat, Sabtu Minggu kosong, 6, 7, 8, 9, oke, 10. Tanggal berapa ini Permohonan dimasukkan?

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:15]

Tanggal 10 Desember 2024, Yang Mulia.

300. KETUA: SALDI ISRA [27:17]

Oke, lanjut!

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:19]

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

302. KETUA: SALDI ISRA [27:22]

Ini berapa selisih suara?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:27]

Kurang-lebih sekitar 30.000 suara, Yang Mulia.

304. KETUA: SALDI ISRA [27:30]

Ini 2 pasangan calon, kan?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:32]

Benar, Yang Mulia.

306. KETUA: SALDI ISRA [27:33]

Ini Freddy Lamhot ini=28.900, begitu?

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:37]

Ya, benar, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [27:39]

Kemudian, yang menang itu 51?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:42]

Benar, Yang Mulia.

310. KETUA: SALDI ISRA [27:43]

Ini berarti kurang-lebih=21.000, ya?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:47]

Ya.

312. KETUA: SALDI ISRA [27:47]

Oke, ini mengurangi angka-angka kecil ini susah juga nih lawyernya. Silakan. Kenapa ini harus disimpangi?

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:55]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Langsung ke Pokok Perkaranya, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [27:56]

Ya.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [27:58]

Pokok Pemohon[sic!].

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, dianggap dibacakan, tabel 1B.

316. KETUA: SALDI ISRA [28:10]

Ya.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [28:12]

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, bila tidak ada pembelian C-6 undangan pemilih seharusnya 50.000 sekian, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir sebagai berikut, tabel 2B, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [28:28]

Ya.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [28:28]

Kemudian yang ketiga bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Termohon, disebabkan adanya:

- a. Pengurangan suara Pemohon di setiap TPS se-Kabupaten Samosir, yakni adanya Pembelian C-6 di setiap TPS, sehingga perhitungan suara antara lain:

1) TPS 02 Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, ada pengurangan suara sebesar=4 suara yang terdapat sebagian terstruktur, sistematis, dan massif, Bukti P-7.

320. KETUA: SALDI ISRA [28:57]

Berapa TPS kejadian seperti itu?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:01]

Cuma ada 1.

322. KETUA: SALDI ISRA [29:02]

1 TPS?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:02]

Ya.

324. KETUA: SALDI ISRA [29:03]

Oke lanjut.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:04]

Yang mungkin ... bisa kita buktikan, Yang Mulia.

326. KETUA: SALDI ISRA [29:05]

Oke.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:05]

Yang kedua, setiap TPS se-Kabupaten Samosir ada banyak pembelian C-6 sebesar Rp300,00[sic!] sampai dengan Rp500,00[sic!].

328. KETUA: SALDI ISRA [29:13]

Pembelian C-6 ini apa maksudnya? Surat undangan itu?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:18]

Ya, surat undangan yang diberikan oleh KPU.

330. KETUA: SALDI ISRA [29:19]

Ya.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:20]

Kemudian salah satu tim dari Pasangan Nomor Urut 2 membeli, sehingga pasangan calon pemilih dari Pasangan 01 tidak hadir.

332. KETUA: SALDI ISRA [29:31]

Tidak hadir, ya?

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:32]

Ya.

334. KETUA: SALDI ISRA [29:33]

Oke.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:34]

Begitu, Yang Mulia.

336. KETUA: SALDI ISRA [29:34]

Berapa banyak itu?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:35]

Yang bisa kita buktikan berdasarkan Bukti P-7, Yang Mulia.

338. KETUA: SALDI ISRA [29:38]

Ya, berapa kira-kira?

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:40]

Ada sekitar 4 suara.

340. KETUA: SALDI ISRA [29:42]

Oh 4, ya? Oke.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:43]

C-6.

342. KETUA: SALDI ISRA [29:44]

C-6, ya?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:00]

Tapi semua masif setiap kecamatan (...)

344. KETUA: SALDI ISRA [29:47]

Jadi berdasarkan yang 4 itu, lalu Anda asumsikan masif terjadi di semua TPS begitu, ya?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:52]

Ya, yang bisa kita buktikan berdasarkan video.

346. KETUA: SALDI ISRA [29:55]

Oke.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:55]

Begitu, Yang Mulia. Kita lanjut, Yang Mulia.

348. KETUA: SALDI ISRA [29:57]

Ya.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:58]

Penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di Kabupaten Samosir sebagai berikut. Setiap TPS (...)

350. KETUA: SALDI ISRA [29:02]

Ini berapa TPS di Samosir? Lupa, ya?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:07]

Lupa, mungkin (...)

352. KETUA: SALDI ISRA [30:08]

KPU.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [29:09]

KPU, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [30:09]

KPU berapa TPS di Samosir?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [30:10]

Atau Bawaslu, Yang Mulia.

356. TERMOHON: VINCENTIUS A.M SITINJAK [30:10]

343, Yang Mulia.

357. KETUA: SALDI ISRA [30:13]

343, 343 TPS. Oke, nah pertanyaan Saya ke Saudara ... apa ... Kuasa Hukum.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [30:22]

Siap, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [30:23]

Dari 343 TPS ini, berapa jumlah TPS yang ... apa namanya ... saksi pasangan calon Anda itu keberatan? Ada enggak?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [30:36]

Untuk saat ini, kita belum mendapatkan keberatan karena pada saat itu.

361. KETUA: SALDI ISRA [30:41]

Eenggak, maksud saya, kan Anda punya Saksi ini.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [30:44]

Ya.

363. KETUA: SALDI ISRA [30:44]

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tadi yang kalah, kan?

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [30:49]

Ya, ya.

365. KETUA: SALDI ISRA [30:50]

Nah, itu kan berapa banyak mereka keberatan di TPS itu? Berapa TPS? Kan kalau Anda tidak setuju, tidak ditanda tangan, lalu bikin catatan keberatan. Berapa TPS yang dilakukan seperti itu?

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:03]

Untuk saat ini, Yang Mulia. Kita belum mendapat informasi bahwa saksi yang kita punya tidak ada keberatan, Yang Mulia.

367. KETUA: SALDI ISRA [31:09]

Oke, jadi tidak ada keberatan, ya?

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:11]

Tidak ada keberatan.

369. KETUA: SALDI ISRA [31:12]

Oke, lanjut.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:14]

Kemudian lanjut, Yang Mulia.

371. KETUA: SALDI ISRA [31:14]

Ya.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:15]

Setiap TPS se-Kabupaten Samosir adanya pembelian C-6 dan money politics TTR sebesar Rp400.000,00 dan serangan fajar sebesar Rp500.000,00. Sehingga kenaikan suara bagi Paslon Nomor Urut 2 di setiap TPS se-Kabupaten Samosir.

373. KETUA: SALDI ISRA [31:31]

Oke.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:32]

Kedua, sehingga di setiap TPS se-Kabupaten Samosir signifikan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 semakin naik dan bertambah.

375. KETUA: SALDI ISRA [31:38]

Oke.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:36]

C (...)

377. KETUA: SALDI ISRA [31:39]

Ini Nomor Urut 2 incumbent, ya?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:40]

Benar, Petahana, Yang Mulia.

379. KETUA: SALDI ISRA [31:42]

Oke.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:42]

C. Terjadi pelanggaran sebagai berikut.

1) Laporan ke Bawaslu Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan KPU Kabupaten Samosir.

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:52]

Oke.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [31:52]

Vide Bukti P-4.

Yang kedua, Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang melakukan pengang ... pengangkatan pejabat di Pemkab Samosir sebelum 6 bulan penetapan pasangan calon, dengan tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri, kemudian setelah (...)

383. KETUA: SALDI ISRA [32:06]

Kapan itu, pengangkatan dilakukan?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [32:09]

Izin, Yang Mulia. Kita ajukan bukti tambahan nanti, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [32:12]

Bukan, pertanyaan saya tuh kapan itu dilakukan? Kan, Anda menyebutkan.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [32:15]

Siap, sebelum penetapan paslon.

387. KETUA: SALDI ISRA [32:18]

Ya, kapan? Setahun, dua tahun, enam bulan, satu bulan? Itu kan, harus real, tanggal (ucapan tidak terdengar jelas) orang tanda tangan, tanggalnya jelas, peristiwanya jelas.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [32:31]

Izin nanti kita ajukan bukti, Yang Mulia.

389. KETUA: SALDI ISRA [32:32]

Kapan mau diajukan bukti lagi?

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [32:35]

Bukti tambahan, Yang Mulia.

391. KETUA: SALDI ISRA [32:38]

Makanya itu ... apa namanya ... ini memberikan keyakinan pada Hakim itu harus nyata loh. Ini tanggal sekian terjadi, ini peristiwanya, ini apa segala macam, itu harus nyata.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [32:51]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kalau tidak salah, sekitar bulan enam. Sebelum paslon ini, petahana ini mengajukan sebagai calon.

393. KETUA: SALDI ISRA [33:01]

Oke (...)

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [33:01]

Ditetapkan sebagai calon (...)

395. KETUA: SALDI ISRA [33:02]

Kalau tidak salah, ya. Kemungkinan ada salahnya juga, ya?

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [33:03]

Ya.

397. KETUA: SALDI ISRA [33:05]

Silakan!

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [33:06]

Lanjut, Yang Mulia.

399. KETUA: SALDI ISRA [33:07]

Ini, repot saya melihat lawyer-lawyer yang tidak siap ini. Terus!

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [33:12]

Lanjut.

401. KETUA: SALDI ISRA [33:13]

Ya.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN

Yang kedua.

403. KETUA: SALDI ISRA [33:15]

Apa lagi?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [33:16]

Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN tanpa izin tertulis dari Mendagri. Vide Bukti P-5, Yang Mulia.

405. KETUA: SALDI ISRA [33:26]

Oke.

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [33:28]

Kemudian 4. Adanya ketidaknetralan ASN Pemkab Samosir serta pejabat melakukan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 2 secara terang-terangan dengan terstruktur, sistematis, dan masif.

407. KETUA: SALDI ISRA [33:38]

Ini yang Napza-Napza ini apa ceritanya ini?

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [33:40]

Gimana, Yang Mulia?

409. KETUA: SALDI ISRA [33:41]

Ini ada Napza ini apa ceritanya? Belum Anda sampaikan ini?

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [33:45]

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia.

411. KETUA: SALDI ISRA [33:51]

Di halaman 6, itu ada Surat Keterangan Pemeriksaan Napza, menunjukkan ada gejala penggunaan narkoba, diduga Petahana.

Nah, coba Anda jelaskan!

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [34:02]

Ya sedikit saya jelaskan, Yang Mulia. Kebetulan kita dugaan ... bahwa kebetulan adanya viral kemarin, terdapat ada suara (...)

413. KETUA: SALDI ISRA [33:13]

Masa lawyer mempercayai viral? Ini harus bicara fakta hukum loh. Misalnya ini orang begini-begini, sehingga begini. Itu harus dijelaskan. Jadi, (...)

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [34:23]

Ya, izin, Yang Mulia. Kita ajukan bukti di (...)

415. KETUA: SALDI ISRA [33:26]

Jangan Anda beralasan, setiap saya tanya, "Kita ajukan bukti, kita ajukan bukti," terus.

Nah, Anda ceritakan ke kita ini, ke kami ini. Coba, ini kan Anda ... saya bacakan ya. "Adanya surat keterangan pemeriksaan Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya atau Napza menunjukkan adanya gejala penggunaan narkoba, diduga Petahana, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tersebar luas di media online dan media sosial, dimana perlu dipanggil dokter yang memeriksa."

Nah, gimana caranya Anda tuh menjelaskan?

416. KUASA HUKUM PEMOHON 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [35:03]

Ya, terima kasih jika diperkenankan, Yang Mulia. Nanti kita buktikan di P-8.

417. KETUA: SALDI ISRA [35:09]

Oke.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [35:10]

Ya.

419. KETUA: SALDI ISRA [35:10]

Lanjut. Apa lagi?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [35:12]

Langsung Petitum saja, Yang Mulia.

421. KETUA: SALDI ISRA [35:13]

Oke, ini karena sudah sering ditanya, lalu tiba-tiba melompat ke Petitum. Silakan!

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [35:18]

Memang sudah habis, Yang Mulia.

423. KETUA: SALDI ISRA [35:19]

Terus, enggak apa-apa.

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [35:20]

Izin, Yang Mulia. Tadi Yang Mulia langsung melompat ke nomor 8, jadi saya juga.

425. KETUA: SALDI ISRA [35:26]

Ya silakan!

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [35:26]

Ya.

427. KETUA: SALDI ISRA [35:28]

Yang saya baca tuh halaman yang 6, loh. Lanjut, lanjut Petitem!

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [35:34]

Ya kita lanjut, Yang Mulia.

429. KETUA: SALDI ISRA [35:36]

Ya.

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [35:36]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

431. KETUA: SALDI ISRA [35:47]

Ya.

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [35:48]

Dua. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 09.43 WIB.

Tiga. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir 2024, hari Jumat, tanggal 6, 2024, pukul 09.43 WIB yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

433. KETUA: SALDI ISRA [36:30]

Oke.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [36:31]

Kemudian. Atau memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melakukan pemilihan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 Vandiko Tomotius Gultom, S.T., Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir.
- c. (...)

435. KETUA: SALDI ISRA [36:58]

Dengan suara 50.000, ya?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [37:00]

Ya.

437. KETUA: SALDI ISRA [37:00]

Oke.

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [37:01]

- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

439. KETUA: SALDI ISRA [37:15]

Saya ini salut juga nih, menentukan angka 50.000 itu. Ya, mestinya kan, dikurangi sedikit, dilebihkan sedikit, gitu.

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [37:23]

Siap.

441. KETUA: SALDI ISRA [37:24]

Ini langsung 50.000, teplak, begitu.

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [37:27]

Ya.

443. KETUA: SALDI ISRA [37:27]

Cukup, ya?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [37:28]

Cukup, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [37:28]

Terima kasih.

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [37:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

447. KETUA: SALDI ISRA [37:31]

Ya. Kita lanjut sekarang ke Perkara 232, Kabupaten Jeneponto.

Sudah ini ... apa ... pindah ke belakang, kita suruh ke depan pemain baru ini. Silakan, sekarang dua ... sudah selesai 3, sekarang Nomor 232, kemudian 139, 144.

144 ada? Kalau enggak, itu naik 188 ke depan. Kuasa Hukum 188. Ada Kuasa Hukum 188?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [38:52]

Baik, Yang Mulia.

449. KETUA: SALDI ISRA [38:53]

Silakan. Terima kasih, 232.

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [38:52]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

451. KETUA: SALDI ISRA [39:03]

Walaikumsalam wr. wb.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [39:04]

Izin, Yang Mulia.

453. KETUA: SALDI ISRA [39:05]

Silakan.

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [39:07]

Hari ini kami hadir berdua, saya atas nama Eko Saputra, rekan kami Anas Malik yang telah dikuasakan oleh Prinsipal dari H. Muhammad Sarif dan Mochammad Noer Alim Qalby (...)

455. KETUA: SALDI ISRA [39:20]

Ini ... ini Kuasa Hukum ketiga orang Padang, ya? Anas Malik tuh nama Bupati Pariaman ketika saya masih kecil-kecil itu, jadi ingat saya. Betul? Silakan.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [39:36]

Mohon izin, Yang Mulia.

457. KETUA: SALDI ISRA [39:37]

Ya.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [39:39]

Kami tadi sudah sampaikan ke petugas untuk penayangan PPT.

459. KETUA: SALDI ISRA [39:43]

Oke, silakan.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [39:44]

Baik, terima kasih.

461. KETUA: SALDI ISRA [39:44]

Silakan, pokoknya tidak beda dari ini, ya?

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [39:49]

Ini hampir dikatakan resume saja, Yang Mulia (...)

463. KETUA: SALDI ISRA [39:51]

Ya.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [39:52]

Pada intinya.

465. KETUA: SALDI ISRA [39:54]

Ini kan ... yang penting tidak ditambah-tambah, begitu.

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [39:56]

Tidak, Yang Mulia.

467. KETUA: SALDI ISRA [39:44]

Ya, silakan.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [39:57]

Baik, terima kasih.

Objek pada Perbaikan Permohonan itu, yaitu Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024, pukul 01.36 WITA.

Kewenangan Mahkamah. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) menurut Pemohon, MK berwenang memeriksa Permohonan Pemohon.

Tenggang Waktu dan Pengajuan Perbaikan Permohonan, objek keluar hari Minggu, tanggal 8 Desember, Pukul 01.36. Batas waktu pengajuan permohonan, tanggal 11 Desember. Permohonan diajukan tanggal 10 Desember, kemudian Perbaikan Permohonan tanggal 12 Desember. Maka, menurut Pemohon, masih dalam Tenggang Waktu Permohonan dan Perbaikan Permohonan.

Legal Standing. Bahwa Permohonan ... Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Haji Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dan seterusnya. Bahwa selisih Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1.800 ... 1.086 suara, sementara ambang batas 1,5% dari 200 (mik terputus).

469. KETUA: SALDI ISRA [41:44]

Silakan. Nah, sudah.

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [41:45]

Cek.

471. KETUA: SALDI ISRA [41:46]

Ya.

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [41:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ulangi.

Bahwa selisih Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1.086 suara, sementara ambang batas 1,5% dari 200 ... 11.914, sama dengan 3.178 suara. Sehingga, masuk ambang batas. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas, dikarenakan antara lain: Termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu atau Panwas Kecamatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dan pelanggaran Termohon lainnya, terkait dengan adanya laporan pelanggaran pemungutan suara yang seharusnya berakibat pemungutan suara ulang.

473. KETUA: SALDI ISRA [42:35]

Berapa TPS yang disuruh pemungutan suara ulang?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [42:38]

25 TPS, Yang Mulia.

475. KETUA: SALDI ISRA [42:40]

Itu perintah Bawaslu?

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [42:42]

Di antaranya adalah 10.

477. KETUA: SALDI ISRA [42:44]

Ya, ini saya tanya berapa yang disuruh perintah?

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [42:47]

10, Yang Mulia.

479. KETUA: SALDI ISRA [42:48]

10, ya?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [42:49]

10, Yang Mulia.

481. KETUA: SALDI ISRA [42:50]

10, tapi tidak dilaksanakan oleh KPU?

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [42:52]

Tidak dilaksanakan oleh KPU.

483. KETUA: SALDI ISRA [42:53]

KPU mana? Betul ada perintah dari Bawaslu untuk PSU? Kasih miknya! Anda jawab betul, ya atau tidak saja.

484. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [43:06]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Betul telah keluar rekomendasi dari panwas kecamatan yang ditujukan kepada penyelenggara kecamatan kami, Yang Mulia, PPK (...)

485. KETUA: SALDI ISRA [43:18]

Untuk dilakukan PSU?

486. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [43:19]

Dilakukan PSU.

487. KETUA: SALDI ISRA [43:20]

Kenapa tidak dilakukan?

488. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [43:21]

Izin, Yang Mulia. Terkait dari ada 2 kecamatan, Kecamatan Bontoramba dan Kecamatan Kelara yang kami ... berdasarkan yang kami temukan dalam satu TPS itu hanya terdapat satu case pemilih, Yang Mulia.

489. KETUA: SALDI ISRA [43:39]

Oke.

490. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [43:40]

Ya.

491. KETUA: SALDI ISRA [43:41]

Kan ini kan ada 25 ... 10.

492. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [43:42]

Siap, Yang Mulia.

493. KETUA: SALDI ISRA [43:43]

Ya, berarti ini faktanya tidak dilaksanakan, ya?

494. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [43:44]

Tidak dilaksanakan.

495. KETUA: SALDI ISRA [43:45]

Alasannya nanti dinilai.

496. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [43:46]

Nanti (...)

497. KETUA: SALDI ISRA [43:47]

Bawaslu mana?

498. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [43:48]

Siap, Yang Mulia.

499. KETUA: SALDI ISRA [43:49]

Bawaslu Jeneponto, ya.

Silakan duduk. Anda nanti jatah berdirinya, coba tolong dijawab, berapa yang Anda rekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang?

500. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [44:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi berdasarkan rekomendasi, itu dikeluarkan oleh panwas kecamatan.

501. KETUA: SALDI ISRA [44:00]

Ya.

502. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [44:08]

Jadi, ada 13 TPS yang direkomendasikan dari 5 kecamatan.

503. KETUA: SALDI ISRA [44:08]

Ya.

504. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [44:17]

Tetapi yang ditindaklanjuti oleh KPU untuk dilakukan PSU adalah 2 TPS.

505. KETUA: SALDI ISRA [44:23]

2 TPS, tapi 11-nya tidak, ya?

506. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [44:25]

Siap, enggak.

507. KETUA: SALDI ISRA [44:25]

Oke, terima kasih.

Itu, Anda cantumkan di Permohonan, ya, TPS-TPS mana saja yang tidak dilakukan PSU, ya?

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [44:32]

Sudah, Yang Mulia.

509. KETUA: SALDI ISRA [44:34]

Oke, berapa itu total suara di 11 TPS itu?

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [44:37]

Kalau di 11 TPS (...)

511. KETUA: SALDI ISRA [44:37]

Ada enggak total suaranya?

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [44:37]

Ada, Yang Mulia.

513. KETUA: SALDI ISRA [44:44]

1 TPS berapa? KPU? 11-11 TPS itu kira-kira total suaranya, DPT-nya berapa? KPU.

514. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [44:51]

Siap, Yang Mulia. Dalam yang kami catat, kami ambil dari data per kecamatan karena yang masuk dalam rekomendasi ini ada 3 kecamatan, Yang Mulia.

515. KETUA: SALDI ISRA [45:08]

Bukan, yang saya tanya di 11, itu berapa jumlah pemilihnya? Ada 5.000 total kalau 500, 1 TPS?

516. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [45:19]

Ya, Yang Mulia.

517. KETUA: SALDI ISRA [45:20]

Sekitar itu, ya?

518. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [45:21]

Sekitar itu, Yang Mulia. Kira-kira kurang-lebih 500 dalam DPT, dalam 1 TPS, Yang Mulia.

519. KETUA: SALDI ISRA [45:27]

Oke. Berapa jumlahnya?

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [45:27]

5.387.

521. KETUA: SALDI ISRA [45:32]

Oke ya, lebih-kurang lah. Oke, di situ berapa pasangan calon Anda dapat suara?

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [45:38]

Ada ... untuk pasangan calon klien kami, Yang Mulia?

523. KETUA: SALDI ISRA [45:38]

Ya.

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [45:39]

Untuk pasangan calon kami 1.468[sic!], Yang Mulia.

525. KETUA: SALDI ISRA [45:51]

1.498[sic!]. Kalau peraih suara terbanyak, berapa suaranya di sebelah situ?

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [45:58]

1.645, Yang Mulia.

527. KETUA: SALDI ISRA [46:00]

1.645. Oke, tipis-tipis juga ini bedanya. Oke, lanjut.

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [46:06]

Kami izin masuk Pokok Permohonan, Yang Mulia.

529. KETUA: SALDI ISRA [46:09]

Oh, tadi belum pokok itu?

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [46:10]

Belum, Yang Mulia.

531. KETUA: SALDI ISRA [46:11]

Oh, silakan.

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [46:13]

Terima kasih.

Pada Pokok Permohonan ini, kita klasifikasi ada 2, yang terkait dengan 10 TPS tadi yang kemudian tidak di (...)

533. KETUA: SALDI ISRA [46:14]

11 atau 10?

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [46:24]

11 dalam dalil kami, Yang Mulia.

535. KETUA: SALDI ISRA [46:24]

Oke.

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [46:27]

Yang tidak kemudian di PSU kan oleh Termohon.

537. KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Pokoknya, semua yang TPS yang direkomendasikan itu tidak usah diulang lagi. Kita sudah dapat kesimpulannya bahwa ada 11 TPS yang tidak dilakukan PSU.

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [46:40]

Baik, Yang Mulia.

539. KETUA: SALDI ISRA [46:41]

Apa yang lain dalilnya?

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [46:41]

Yang kedua adalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam melaksanakan pemungutan suara di 15 TPS, Yang Mulia.

541. KETUA: SALDI ISRA [46:51]

Oke. Jadi ini tidak termasuk yang tadi dilaporkan?

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [46:54]

Tidak termasuk, Yang Mulia.

543. KETUA: SALDI ISRA [46:55]

Di luar itu lagi?

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [46:55]

Di luar lagi, Yang Mulia.

545. KETUA: SALDI ISRA [46:57]

Apa pelanggarannya?

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [47:01]

Untuk ... bahwa di TPS 1 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat.

547. KETUA: SALDI ISRA [47:13]

Ya.

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [47:14]

Ada pemilih atas nama Hasbi dan Renti (...)

549. KETUA: SALDI ISRA [47:17]

Ya.

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [47:18]

Yaitu menggunakan hak pilihnya. Namun pada faktanya bahwa kedua orang ini, itu kemudian ada di luar daerah, Yang Mulia.

551. KETUA: SALDI ISRA [47:25]

Bagaimana Anda memastikan orang itu di luar daerah?

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [47:25]

Ini berdasarkan Bukti P-21 dan P-22, Yang Mulia.

553. KETUA: SALDI ISRA [47:33]

Oke, ndak ... bahwa dia di luar daerah itu, bagaimana caranya Anda membuktikannya?

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [47:33]

Berdasarkan daftar hadir, kemudian ada saksi juga, Yang Mulia, yang mengetahui itu.

555. KETUA: SALDI ISRA [47:43]

Anda tanya ke Hasbi enggak?

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [47:46]

Menurut dari Prinsipal kami bahwa ini telah disampaikan ke Hasbi dan Hasbi dikonfirmasi bahwa dia memang lagi di luar daerah, Yang Mulia.

557. KETUA: SALDI ISRA [47:55]

Oke lanjut, TPS 02. Apa lagi kejadian di situ?

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [47:59]

02 itu terkait dengan Pemilih khusus atas nama Edi Bahar.

559. KETUA: SALDI ISRA [48:06]

Ya.

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [48:08]

Dia memilih di TPS 2 Banrimanurung itu, Yang Mulia.

561. KETUA: SALDI ISRA [48:09]

Ya.

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [48:09]

Yang semestinya terdaftar di TPS 3 Kandui, Kecamatan Timang di Kabupaten Barito Utara. Kemudian (...)

563. KETUA: SALDI ISRA [48:17]

Oke, ini beda kabupaten, ya?

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [48:21]

Beda kabupaten, Yang Mulia.

565. KETUA: SALDI ISRA [48:22]

Jadi orang di KTP-nya bukan di Jeneponto, milihnya di Jeneponto?

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [48:26]

Milihnya di Jeneponto, Mulia.

567. KETUA: SALDI ISRA [48:26]

Oke, apa lagi?

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [48:29]

Kemudian, DPK atas nama Srie Subaedah dan Muhammad Syarwan Nur itu juga terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala. Berdasarkan dengan ketentuan ini, Yang Mulia (...)

569. KETUA: SALDI ISRA [48:49]

Dia memilih di TPS 02?

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [48:53]

Ya, memilih di ps ... TPS 02.

571. KETUA: SALDI ISRA [48:54]

Jangan-jangan dia pilih pasang calon Anda ... pasangan calon Anda ini, orang ini? Enggak?

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [48:58]

Ya, kita enggak melihat dari situanya, Yang Mulia.

573. KETUA: SALDI ISRA [49:02]

Oke, lanjut. TPS 03 apa yang terjadi?

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [49:03]

TPS 03 itu (...)

575. KETUA: SALDI ISRA [49:03]

Mirip-mirip itu semua, ya?

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [49:05]

Hampir mirip semua, Yang Mulia.

577. KETUA: SALDI ISRA [49:07]

Oke, sampai TPS... wah, ini banyak juga ini.

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [49:13]

Ini ada 25 ... 15 TPS, Yang Mulia.

579. KETUA: SALDI ISRA [49:16]

Oke, Anda laporkan enggak, ke Bawaslu itu?

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [49:20]

Ini dilaporkan juga, Yang Mulia.

581. KETUA: SALDI ISRA [49:24]

Dilaporkan juga ini apa maksudnya?

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [49:26]

Dilaporkan ke Bawaslu.

583. KETUA: SALDI ISRA [49:28]

Oke, apa rekomendasi Bawaslunya?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [49:34]

Rekomendasi Bawaslu itu, ada yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan, tapi berdasarkan P ... P bukti semua yang kita ajukan dari 15 kecamatan ini, itu lengkap, Yang Mulia.

585. KETUA: SALDI ISRA [49:47]

15 TPS?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [49:48]

15 TPS.

587. KETUA: SALDI ISRA [49:48]

15 kecamatan banyak sekali.

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [49:50]

Maaf, Yang Mulia.

589. KETUA: SALDI ISRA [49:51]

Jangan gugup, santai saja.

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [49:51]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

591. KETUA: SALDI ISRA [49:57]

Oke, jadi ini soal kesalahan ya, orang yang tidak berhak yang memilih di situ ya, di 15 TPS?

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [50:02]

Ya, Yang Mulia.

593. KETUA: SALDI ISRA [50:02]

Oke, Bawaslu mana? Ada enggak, laporan ini ke Bawaslu?

594. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [50:14]

Untuk laporan di Kecamatan Banrimanurung ada masuk di Bawaslu, Yang Mulia.

595. KETUA: SALDI ISRA [50:20]

Apa hasilnya di Bawaslu?

596. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [50:20]

Di Bawaslu itu tidak dilanjutkan, laporannya dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai penanganan pelanggaran.

597. KETUA: SALDI ISRA [50:27]

Oke, jadi yang 15 ini dianggap tidak pelanggaran, ya?

598. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [50:30]

Ya, karena tidak memenuhi syarat formil.

599. KETUA: SALDI ISRA [50:33]

Apa syarat formil yang tidak terpenuhi?

600. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [50:34]

Ada syarat yang tidak terpenuhi, Yang Mulia.

601. KETUA: SALDI ISRA [50:36]

Ya, apa syaratnya?

602. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [50:37]

Terhadap bukti yang diajukan. Jadi, Bawaslu meminta untuk melakukan perbaikan terhadap bukti yang kurang, tapi kemudian pelapor ini tidak (...)

603. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

Melengkapi.

604. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [50:51]

Melengkapi, Yang Mulia.

605. KETUA: SALDI ISRA [50:53]

Betul Anda tidak melengkapi, pelapor? Yang diminta mereka tidak dilengkapi?

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [50:59]

Kalau berdasarkan bukti kami, Yang Mulia, itu sebenarnya lengkap.

607. KETUA: SALDI ISRA [51:03]

Bukan, kan diminta melengkapi. Anda lengkapi atau tidak?

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [51:07]

Untuk pada proses itu, Yang Mulia, mohon izin, bukan kami yang mendampingi Prinsipal pada proses.

609. KETUA: SALDI ISRA [51:15]

Bukan, saya tidak tahu mau siapa yang mendampingi sekarang, kan yang mendampingi Prinsipal di hadapan kami, kan Anda?

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [51:18]

Siap, Yang Mulia.

611. KETUA: SALDI ISRA [51:19]

Jangan berdalih-dalih begitu, ada atau tidak? Dilengkapi atau tidak?

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [51:20]

Tidak, Yang Mulia.

613. KETUA: SALDI ISRA [51:26]

Cukup. Kalau begitu, Anda langsung Petitum sekarang.

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [51:27]

Mohon izin, rekan kami yang membacakan, Yang Mulia.

615. KETUA: SALDI ISRA [51:29]

Silakan! Kan dua itu saja isunya, ya?

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANAS MALIK [51:34]

Siap, Yang Mulia.

617. KETUA: SALDI ISRA [51:35]

Isu besarnya kan? Silakan, Petitem!

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANAS MALIK [51:34]

Izin, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Bismillahirrahmanirrahim.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

619. KETUA: SALDI ISRA [51:53]

Yang tadi lupa baca bismillah, makanya sekarang baca bismillah.

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANAS MALIK [51:55]

Dua. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024.

Tiga. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

621. KETUA: SALDI ISRA [52:17]

Oke.

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANAS MALIK [52:18]

Atau setidaknya-tidaknya.

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tempat pemungutan suara sebagai berikut. 15 TPS dianggap dibacakan.

623. KETUA: SALDI ISRA [52:30]

15 atau 25?

624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANAS MALIK [52:32]

25 TPS, Yang Mulia.

Kemudian, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

625. KETUA: SALDI ISRA [52:51]

Oke, terima kasih.

Yang Mulia Pak Arsul Sani, dipersilakan.

626. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:55]

Terima kasih, Pak Ketua Panel.

Ini Saudara Kuasa Pemohon, ya. Saya membaca di halaman 27 nih, angka 7, ya.

Pertama ... eh saya bacakan saja. "Bahwa jika perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS tersebut dinyatakan 0 sepanjang tidak dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut," ada tabel. Dimana kemudian pasangan calon yang Anda wakili menjadi unggul sekitar 2.000 dari yang tadinya berdasarkan penetapan, tertinggal, selisih, kalah, 2.000.

Nah, ini penjelasannya apa ini, terutama kata-kata dinyatakan nol. Apanya yang dinyatakan nol? Coba jelaskan.

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [53:47]

Maksudnya, kurang-lebih seperti ini, Yang Mulia. Bahwa ketika 25 TPS tersebut yang kami mohonkan kemudian itu dinolkan.

628. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:58]

Dinolkan itu bagi siapa?

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [54:00]

Dinolkan untuk semua, Yang Mulia, pasangan calon.

630. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:02]

Untuk semua, jadi itu dikeluarkan dari perhitungan akhir, ya?

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [54:06]

Dikeluarkan dari perhitungan akhir, Yang Mulia.

632. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:08]

Ya, baik untuk perolehan suara ... yang ... apa ... Pemohon?

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [54:12]

01, 02, bahkan sampai (...)

634. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:14]

Sampai (...)

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [54:14]

Sampai ke Prinsipal kami juga dinolkan.

636. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:16]

Oh, begitu?

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [54:16]

Ya, Yang Mulia.

638. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:16]

Bukan dinolkan hanya yang untuk saat ini dinyatakan sebagai yang paling unggul, gitu ya?

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [54:22]

Bukan, Yang Mulia, semuanya dinolkan.

640. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:24]

Dinolkan semua. Dan itu yang Anda kehendaki?

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [54:26]

Ya, Yang Mulia.

642. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:28]

Oh begitu, jadi, oke. Oke (...)

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [54:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

644. KETUA: SALDI ISRA [54:32]

Terima kasih.

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup.

Berikut, Perkara Nomor 139, Kabupaten Muaro Jambi, silakan. Poin-poinnya saja, Pak Heru.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [55:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pemohon dalam Perkara ini, atas nama Zuwanda dan Sawaluddin, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan Nomor Urut 2, Yang Mulia, mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Objek Permohonan Keputusan Termohon Nomor 1555 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Termohon Nomor 1385 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024.

Yang pertama, yang kami sampaikan berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah. Menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini.

Kemudian berkenaan dengan tenggang waktu, oleh karena keputusan yang menjadi obyek permohonan ditetapkan hari Sabtu, tanggal 7 Desember, sedangkan Permohonan diajukan pada hari Senin, tanggal 9, maka memenuhi tenggang waktu, termasuk juga Perbaikan Permohonannya, yang kami ajukan di tanggal 11 Desember.

Selanjutnya, berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Kami sampaikan, Yang Mulia. Di halaman 7, di poin 4, meskipun selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dimana Pemohon memperoleh suara=60.681 suara.

Dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini Pihak Terkait, memperoleh suara=73.367. Sehingga, selisihnya mencapai=12.686.

Namun menurut Pemohon, hasil perolehan tersebut ... oleh karena hasil perolehan suara tersebut telah dicemari oleh penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih di berbagai TPS yang Pemohon dapatkan buktinya, terdapat di 203 TPS, yang tersebar di 3 Kecamatan.

Kecamatan Mestong=70 TPS, tersebar di 14 desa.

Jaluko=89 TPS di 19 desa.

Dan Kumpeh Ulu=44 TPS, yang tersebar di 13 desa.

646. KETUA: SALDI ISRA [57:38]

Berapa jumlah TPS nya ini, Pak Heru?

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [57:39]

TPS yang kami persoalkan 203 TPS, Yang Mulia.

648. KETUA: SALDI ISRA [57:42]

203, jumlah TPS total?

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [57:45]

Kami tidak tahu persis, Yang Mulia.

650. KETUA: SALDI ISRA [57:56]

KPU Muaro Jambi ada? Berapa jumlah TPS?

651. TERMOHON: ALMUTTAQIN [57:54]

Jumlah TPS.

652. KETUA: SALDI ISRA [57:49]

Berapa jumlah TPS seluruhnya?

653. TERMOHON: ALMUTTAQIN [57:55]

796.

654. KETUA: SALDI ISRA [57:58]

796.

655. TERMOHON: ALMUTTAQIN [57:59]

Ya.

656. KETUA: SALDI ISRA [58:00]

Oke. Lebih-kurang nih seperempatnya, Pak Heru.

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:03]

Baik.

658. KETUA: SALDI ISRA [58:04]

Ini dari pertanyaannya, enggak usah diuraikan semua, kita sudah lihat.

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:07]

Ya.

660. KETUA: SALDI ISRA [58:08]

Nah, dari 203 itu, ini setelah di tahap mana diketahui ada masalahnya?

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:14]

Bagaimana, Yang Mulia? Mohon diulangi.

662. KETUA: SALDI ISRA [58:16]

Di tahap perhitungan mana, diketahui ada masalah-masalah ini?

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:18]

Masalah ini kami ketahui di tahap perhitungan di tingkat Kecamatan, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [58:23]

Kecamatan?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:23]

Ya.

666. KETUA: SALDI ISRA [58:24]

Dari 203 TPS ini.

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:26]

Ya.

668. KETUA: SALDI ISRA [58:27]

Berapa yang tidak ditandatangani atau yang ada keberatan saksi paslon yang Saudara wakili?

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:34]

Persisnya kami tidak tahu, Yang Mulia.

670. KETUA: SALDI ISRA [58:35]

Persisnya tidak tahu?

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:37]

Ya, jadi yang kami persoalkan karena ternyata ada pemilih-pemilih yang belum rekam e-KTP.

672. KETUA: SALDI ISRA [58:45]

Oke.

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [58:45]

Diberikan kesempatan memilih, Yang Mulia. Maka, kami kemudian juga nanti kami uraikan permasalahan ini kami laporkan ke Bawaslu juga.

674. KETUA: SALDI ISRA [58:54]

KPU, nah ini KPU lagi.

675. TERMOHON: ALMUTTAQIN [58:55]

Yang Mulia.

676. KETUA: SALDI ISRA [58:56]

Dari 203 itu, TPS itu, berapa saksi pasangan calon yang tidak tanda tangan?

677. TERMOHON: ALMUTTAQIN [59:02]

Kalau untuk Pasangan 02, hampir seluruhnya tidak tanda tangan.
Tapi pas Pleno tingkat kabupaten (...)

678. KETUA: SALDI ISRA [59:09]

Bukan, di TPS?

679. TERMOHON: ALMUTTAQIN [59:11]

Di TPS?

680. KETUA: SALDI ISRA [59:12]

Ya.

681. TERMOHON: ALMUTTAQIN [59:12]

Cuma 02.

682. KETUA: SALDI ISRA [59:14]

Yang tidak tanda tangan?

683. TERMOHON: ALMUTTAQIN [59:15]

Yang tidak tanda tangan.

684. KETUA: SALDI ISRA [59:16]

Ini 02 yang apa, ya?

685. TERMOHON: ALMUTTAQIN [59:20]

Ya.

686. KETUA: SALDI ISRA [59:20]

Yang suaranya Nomor ... Nomor Urut 2?

687. TERMOHON: ALMUTTAQIN [59:22]

Nomor Urut 2.

688. KETUA: SALDI ISRA [59:23]

Jadi, semuanya tidak tanda tangan dari TPS?

689. TERMOHON: ALMUTTAQIN [59:26]

Ya.

690. KETUA: SALDI ISRA [59:27]

Oke, silakan melanjut, Pak Heru.

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [59:29]

Baik, terima kasih KPU telah membantu menjawab.

Maka, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menerima Permohonan ini dan mempertimbangkannya bersama-sama pokok perkara, mengingat pelanggaran tersebut sangat signifikan dan perolehan suara pasangan calon telah tercemari oleh suara-suara dari pemilih yang tidak berhak mencoblos. Namun, difasilitasi oleh Termohon untuk mencoblos di TPS.

692. KETUA: SALDI ISRA [59:55]

Oke.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [59:54]

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [59:57]

Ada lagi di luar TPS itu? Yang harus disampaikan?

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [60:00]

Ya, ini masuk ke Pokok Permohonan, Yang Mulia (...)

696. KETUA: SALDI ISRA [01:00:01]

Loh, tadi belum Pokok-Pokok Permohonan, ya?

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:00:02]

Tadi, baru legal standing, mohon izin.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:00:04]

Tapi kan, sudah ada di dalam semuanya itu.

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:00:06]

Baik.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:00:07]

Di luar soal TPS itu (...)

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:00:08]

Ya (...)

702. KETUA: SALDI ISRA [01:00:09]

Ada lagi enggak? Yang (...)

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:00:10]

Mohon izin (...)

704. KETUA: SALDI ISRA [01:00:10]

Yang Dalilnya (...)

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:00:11]

Dalilnya tidak ada. Jadinya, kami mohon izin menguraikan menggunakan kesempatan 15 menit yang dialokasikan untuk Muaro Jambi.

706. KETUA: SALDI ISRA [01:00:17]

Ya, sekarang tinggal 10 menit, Pak.

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:00:18]

Baik.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:00:20]

Silakan.

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:00:21]

Baik, dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia,
Kami sampaikan, rinciannya 203 TPS itu, pertama, di halaman 15 kami sampaikan ... mohon maaf di halaman 17.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:00:38]

Ya.

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:00:38]

Pelanggaran-pelanggaran tersebut kami uraikan, di TPS 1 ada nama Putri Dewi Lestari, belum merekam e-KTP, kemudian di TPS 2 ada Alika Septiani, di TPS 3 ada Kharisma Nurul, ada Fitri Rahmadani, ada Nur Qowim, Nur Qoimah, Tirta Sandy, dan seterusnya.

Kemudian di TPS 5 ada Anissa, ada Ilham Pratama, kemudian di TPS 2 Muaro Sebapo ada Fadiel Firan (...)

712. KETUA: SALDI ISRA

Ini kalau Bapak bacakan semua, pusing (...)

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:08]

Ya.

714. KETUA: SALDI ISRA

Kami mendengarnya (...)

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:10]

Kami ambil sampelnya, Yang Mulia.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:01:11]

Ya, ini kita (...)

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:11]

Jadi (...)

718. KETUA: SALDI ISRA [01:01:12]

Sudah lihat, Pak Heru (...)

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:12]

Kami uraikan dan mohon izin kami sampaikan bahwa rincian dari apa yang kami dalilkan, kami Buktikan di P-9 sampai dengan P-207.

720. KETUA: SALDI ISRA [01:01:24]

Oke.

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:25]

Untuk penggunaan atau pencoblosan oleh pemilih yang tidak (...)

722. KETUA: SALDI ISRA [01:01:30]

Itu usianya mencukupi enggak, Pak Heru?

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:32]

Usia mencukupi (...)

724. KETUA: SALDI ISRA [01:01:33]

Usia (...)

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:33]

Tapi belum rekam e-KTP, Yang Mulia (...)

726. KETUA: SALDI ISRA [01:01:34]

Belum, punya e-KTP (...)

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:35]

Atau maupun biodata kependudukan.

728. KETUA: SALDI ISRA [01:01:36]

Oke.

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:36]

Jadi, untuk Kecamatan Mestong kami Buktikan di P-9 sampai dengan P-217.

730. KETUA: SALDI ISRA [01:01:42]

Oke.

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:01:43]

Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia.

Kami sampaikan untuk di Kecamatan Jaluko, pelanggaran yang sama, pemilihan atau penggunaan hak suara oleh pemilih yang belum memenuhi syarat, sebagaimana Pasal 19 PKPU, kami Buktikan di P-218 sampai dengan P-468, di beberapa kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota. Jambi Luar Kota namanya, Yang Mulia.

732. KETUA: SALDI ISRA [01:02:14]

Ya.

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:02:15]

Selanjutnya, untuk pemilihan oleh pemilih yang belum mempunyai hak pilih, di Kecamatan Kumpeh Ulu di halaman 27 rinciannya, nama-nama pemilih tersebut kami uraikan halaman 27 dan seterusnya. Kami buktikan dengan Bukti P-600 maaf ... P-469 sampai dengan P-600.

734. KETUA: SALDI ISRA [01:02:39]

Oke. Lanjut.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:02:40]

Lanjut, Yang Mulia.

Ke halaman berikutnya, sebelum kami sampai pada Petitem. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang kami uraikan di atas. Kami lanjut ke halaman 33.

736. KETUA: SALDI ISRA [01:03:03]

Oke. Ini jumlah-jumlah TPS, ya (...)

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:03:03]

Kami sudah melaporkan (...)

738. KETUA: SALDI ISRA [01:03:05]

Pak Heru, ya? (...)

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:03:06]

Ya (...)

740. KETUA: SALDI ISRA [01:03:06]

Di masing-masing kecamatan, ya?

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:03:08]

Benar, Yang Mulia.

742. KETUA: SALDI ISRA [01:03:09]

Kecamatan Mestong ini uraiannya, Jaluko ini uraiannya (...)

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:03:14]

Ya.

744. KETUA: SALDI ISRA [01:03:14]

Kemudian, Kumpeh Ulu.

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:03:15]

Ya.

746. KETUA: SALDI ISRA [01:03:16]

Lanjut.

747. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:03:17]

Kami totalkan di Mestong 70 TPS tadi (...)

748. KETUA: SALDI ISRA [01:03:20]

Ya.

749. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:03:21]

Jaluko 89 TPS, Kumpeh Ulu 44 TPS.

750. KETUA: SALDI ISRA [01:03:23]

Oke.

751. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:03:24]

Jadi, pelanggaran ini sudah kami laporkan kepada Bawaslu. Dan berdasarkan pemberitahuan status laporan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, tanggalnya 11 Desember, Yang Mulia.

752. KETUA: SALDI ISRA [01:03:37]

Ya.

753. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025:HERU WIDODO [01:03:38]

Disebutkan dalam pemberitahuan tersebut status laporan ditindaklanjuti. Dan yang angka kedua terdapat pelanggaran administrasi pemilihan di 70 TPS yang tersebar di 14 desa, di wilayah Kecamatan Mestong.

Kemudian 89 TPS yang tersebar di 19 desa di wilayah Kecamatan Jaluko.

Dan yang c, 44 TPS yang tersebar di 13 desa di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:04:06]

Ada perintah PSU enggak, dari Bawaslu?

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:04:08]

Hanya disebut (...)

756. KETUA: SALDI ISRA [01:04:09]

Bawaslu mana? Ada perintah PSU enggak? Bukan, ini didengar dulu. Pakai mik, itu.

757. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [01:04:24]

Kalau berkaitan dengan laporan, tidak ada yang berkaitan dengan kemarin PSU[sic!], tapi sebelumnya ada 2 TPS.

758. KETUA: SALDI ISRA [01:04:28]

Itu dilaksanakan tidak?

759. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [01:04:29]

Dilaksanakan KPU, tanggal 7. Makanya awalnya kan, tanggal 4, Yang Mulia.

760. KETUA: SALDI ISRA [01:04:33]

Ya.

761. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [01:04:34]

Penetapan, abis itu perubahan jadi tanggal 7.

762. KETUA: SALDI ISRA [01:04:35]

Ya.

763. BAWASLU: DEDI WAHYUDI [01:04:36]

Setelah di-PSU-kan.

764. KETUA: SALDI ISRA [01:04:37]

Oke. Lanjut.

765. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:04:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Atas dasar argumentasi yuris ... yuridis tersebut, maka menurut Pihak Terkait terbukti terdapat pelanggaran penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih di 203 (...)

766. KETUA: SALDI ISRA [01:04:54]

Kok Pihak Terkait?

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:04:55]

TPS tersebut (...)

768. KETUA: SALDI ISRA [01:04:55]

Pemohon, ya?

769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:04:55]

Menurut Pemohon, mohon maaf.

770. KETUA: SALDI ISRA [01:04:58]

Pak Heru, mau jadi Pihak Terkait saja ini. Silakan.

771. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:05:04]

Kami ulangi, Yang Mulia.

772. KETUA: SALDI ISRA [01:05:05]

Ya.

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:05:06]

Atas dasar argumentasi ... argumentasi yuridis tersebut, maka menurut Pemohon terdapat pelanggaran penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih di 203 TPS tersebut.

Oleh karenanya, pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagaimana Pemohon uraikan di atas, terdapat cukup dasar dan alasan yuridis bagi Pemohon, dengan juga mempertimbangkan putusan atau selaras dengan Putusan Mahkamah Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, beralasan hukum untuk dimohonkan pemungutan suara ulang di TPS-TPS dimaksud, Yang Mulia.

Selanjutnya, dalam Petikum, kami mohon izin rekan kami yang membacakan.

774. KETUA: SALDI ISRA [01:05:51]

Silakan. Jangan dibacakan semua TPS-nya.

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [01:05:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

776. KETUA: SALDI ISRA [01:05:51]

Ya.

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [01:05:57]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1555 Tahun 2004[sic!] tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 1383[sic!] ... 5 Tahun 2004[sic!] tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi tahun 2004[sic!] yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024 adalah batal, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang perubahan perolehan da ... di 203 ... 203 TPS yang tersebar di 46 desa dan berada di wilayah 3 kecamatan, pada Kabupaten Muaro Jambi (...)

778. KETUA: SALDI ISRA [01:07:19]

Sebagai berikut.

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [01:07:19]

Sebagai berikut.

70 TPS wilayah, dianggap dibacakan. Masuk Kecamatan Mestong.
89 TPS di wilayah Kecamatan Jaluko, dianggap dibacakan.
44 TPS di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu, dianggap dibacakan.

780. KETUA: SALDI ISRA [01:07:41]

Terus.

781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [01:07:41]

Dan 70 TPS di wilayah kecamatan, ya (...)

782. KETUA: SALDI ISRA [01:07:42]

Sudah, tadi.

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [01:07:45]

Poin 3, memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang Wakil Bupati ... Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di 200 ... 2024 di 203 TPS yang tersebar di 45 desa, di wilayah (...)

784. KETUA: SALDI ISRA [01:08:13]

46.

785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [01:08:14]

46 desa, di wilayah kecamatan pada ... Kecamatan Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dianggap dibacakan.

786. KETUA: SALDI ISRA [01:08:24]

Oke.

787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [01:08:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

788. KETUA: SALDI ISRA [01:08:26]

Terus, poin keempat belum dibacakan itu?

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [01:08:28]

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.
Ex aequo et bono. Terima kasih.

790. KETUA: SALDI ISRA [01:08:37]

Oke, cukup. Terima kasih.

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [01:08:40]

Ya.

792. KETUA: SALDI ISRA [01:08:42]

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia Pak Arsul?

793. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:44]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.
Pak Heru, ya?

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:08:49]

Siap, Yang Mulia.

795. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:50]

Ini setiap hari Pak Heru ada di Panel ini dan juga di Panel yang ... luar biasa ini. Mudah-mudahan tambah sejahtera dan tambah sehat, Pak Heru.

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:00]

Aamiin ya rabbal alamin.

797. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:02]

Pak Heru, saya mau tanya. Ini saya agak bertanya signifikansinya, ya. Itu berapa total pemilih yang memilih, padahal belum melakukan perekaman e-KTP? Berapa itu, Pak Heru? Ini Anda ada jumlahnya sih, tapi saya enggak mau menjumlah sendiri. Itu berapa kira-kira?

798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:30]

Jadi, mohon maaf, Yang Mulia.

799. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:32]

Ya.

800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:33]

Kalau jumlah pemilih di (...)

801. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:34]

Enggak, yang itu tadi, yang Anda dalilkan. Kan menurut Anda seharusnya dia tidak punya hak untuk memilih. Kira-kira kan begitu, kan?

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:42]

Ya.

803. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:43]

Karena tidak jelas dia itu penduduk situ atau enggak. Karena belum melakukan perekaman KTP, e-KTP. Kan begitu?

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:52]

Ya.

805. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:53]

Berapa itu?

806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:55]

Baik, Yang Mulia. Ini pertanyaan yang sulit. Tapi kami sampaikan bahwa kalau jumlah pemilih ... Ini kan sudah tercampur, Yang Mulia.

807. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:06]

Ya.

808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:07]

Antara pemilih yang punya hak dengan yang tidak punya hak.

809. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:09]

Betul.

810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:10]

Kami sudah mencoba untuk menyisir atau me (...)

811. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:14]

Kan ada daftarnya ini di permohonan, Pak Heru?

812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:17]

Di daftarnya ada.

813. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:18]

Ya.

814. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:19]

Kalau jumlah (...)

815. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:20]

Ya. Cuma saya bisa juga jumlah sendiri, kalau berdasarkan daftar itu.

816. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:23]

Ya. Kalau jumlah suara sahnya di 3 TPS itu, 58.719.

817. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:30]

Ya.

818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:31]

Tapi ini tercampur. Tercampur dengan pemilih-pemilih yang belum merekam e-KTP.

819. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:37]

Nah, ya. Nah, maksudnya teridentifikasi belum? Yang belum terekam e-KTP itu totalnya berapa? Karena kan yang Pak Heru permasalahan, kan itu.

820. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:46]

Ya.

821. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:47]

Itu lho. Adanya percampuran. Sementara selisih antara Pemohon dengan yang paling banyak. Nomor berapa itu? 4, ya? Itu kan 13.000.

822. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:00]

Ya.

823. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:01]

Itu kan harus kita lihat juga, itu ya. Jangan-jangan malah kalau yang belum ... ini dugaan, yang belum merekam itu, justru banyak yang milih ini ... Pemohon?

824. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:20]

Jadi begini, Yang Mulia. Kalau kami mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang terdahulu.

825. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:26]

Ya.

826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:27]

Mohon maaf, ya. Mohon izin kami untuk menjelaskan. Terlepas dari pemilih yang belum berhak ini memilih.

827. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:36]

He eh.

828. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:37]

Pasangan calon mana. Itu merupakan suatu pelanggaran yang menjadikan ... dapat dijadikan dasar untuk diulang.

829. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:43]

Betul, betul.

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:44]

Minimal 2 ... minimal 2 pemilih.

831. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:46]

Ya.

832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:47]

Dari pertanyaan Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Memang kami tidak jumlahkan. Ada yang di 1 TPS, ada 3 orang, ada 4 orang, ada yang 10 orang. Jadi, kami identifikasi nama-nama itu, tanpa memperhatikan jumlahnya, yang jelas minimal 2, sudah ada sebagai syarat untuk dapat diulangnya di TPS tersebut, Yang Mulia.

833. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:09]

Ya, itu bisa. Nanti kami pertimbangkan, gitu lho. Karena kan Pak Heru tahu juga, MK ini juga dalam banyak putusan juga ... apa ... melihat juga signifikansinya itu kan, gitu ya. Terima kasih.

834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:12:26]

Terima kasih, Yang Mulia

835. KETUA: SALDI ISRA [01:12:28]

Terima kasih.
 Yang Mulia, Pak Ridwan? Cukup, ya.
 Cukup ya, Pak Heru, ya?

836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:12:32]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

837. KETUA: SALDI ISRA [01:12:35]

Kalau tidak cukup, saya cukup-cukupkan nanti.
 Kemudian untuk Perkara 144, ini sudah resmi menarik Permohonan, ya. Perkara 144 ditarik, jadi ... Termohon 144 ada, enggak? Ada. Jadi enggak perlu bekerjalah. Kuasa hukum, pakai Kuasa Hukum enggak? Lebih-lebih Kuasa Hukumnya.
 Pihak Terkaitnya ada 144? Enggak ada, ya. Berarti ini perkara ini tidak akan dilanjutkan, kita ... apa ... case closed ini. Jadi ini akan ditetapkan nanti dan akan dilaporkan Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga di sidang berikutnya tidak akan dipanggil lagi.
 Kita lanjut sekarang ke Perkara 188, silakan.

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:13:33]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
 Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih.
 Hadir pada persidangan hari ini, saya sendiri Muhammad Iqbal Sumarlan Putra bersama rekan saya Junaedi Rano Wiradinata. Dalam hal ini mewakili Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak Fak Tahun 2024.
 Yang Mulia, izinkanlah dalam waktu 15 menit ini, saya menyampaikan sekitar 1 menit.
 Yang pertama adalah tadi untung ... apa ... sudah disampaikan oleh Yang Mulia bahwa dalam Perkara Permohonan Kabupaten Fak Fak ini, terdapat 2 Permohonan, Yang Mulia. Satu yang dari Pemantau Pemilu, tadinya kami ingin meminta sikap dari Yang Mulia, apakah kami pun harus menjadi Pihak Terkait, padahal satu sisi kami juga adalah Pemohon.
 Yang kedua adalah terkait renvoi, Yang Mulia. Pada pagi ini kami sudah menyampaikan surat keterangan renvoi yang sudah disampaikan.

839. KETUA: SALDI ISRA [01:14:25]

Renvoi, apa ini?

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:14:26]

Untuk Permohonan, Perbaiki Permohonan, Yang Mulia.

841. KETUA: SALDI ISRA [01:14:28]

Tidak ada lagi.

842. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:14:28]

Baik, Yang Mulia. Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

843. KETUA: SALDI ISRA [01:14:32]

Lanjut.

844. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:14:33]

Oke, kami lanjut saja, Yang Mulia, ringkas saja. Di sini terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Yang kedua adalah terkait Kedudukan Hukum Pemohon, dimana di sini kami berargumentasi, meskipun selisih antara kami dengan Paslon Nomor Urut 2 lebih dari 2%, namun ada alasan-alasan yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus ... istilahnya mengeliminir Pasal 158, yakni, kami bacakan, Yang Mulia.

- a. Adanya pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPPS, Termohon yang terjadi di 16 TPS.
- b. KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur, sehingga kotak suara menjadi ragu[sic!] keabsahannya di 16 TPS.
- c. Pelanggaran berupa adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 surat suara yang terjadi di 2 TPS.
- d. Pelanggaran berupa adanya pemilih yang diwakili oleh pemilih lain yang terjadi di 5 TPS.
- e. Pelanggaran berupa adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fak Fak yang terjadi di 1 TPS.
- f. Pelanggaran berupa adanya pemilih di bawah umur yang terjadi di 1 TPS.

- g. KPPS mempersilakan pemilih melakukan pencoblosan, meski telah lewat waktu pemilihan di 2 TPS.
- h. Adanya pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang terjadi di 1 TPS.
- i. Dan yang terakhir, adanya pelanggaran pemilihan secara TSM yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fak Fak dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa akibat pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak Fak, itu terjadi di 40 TPS, Yang Mulia. Dengan total suara tercemar adalah=13.197 suara, yang jelas mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dan berpotensi menjadi perolehan suara bagi Pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran kecurangan, Yang Mulia.

Untuk poin selanjutnya, Yang Mulia. Kami akan membacakan mengenai tenggang waktu permohonan. Permohonan ini diajukan pada hari Senin, tanggal 9 Desember, masih dalam tenggat waktu, Yang Mulia, karena terakhir itu, Permohonan ini batas waktunya adalah 10 Desember. Nah, KPU itu mengeluarkan keputusan pada hari Jumat, 6 Desember, pukul 05.15 WIT.

Kami langsung kepada beberapa dalil saja, Yang Mulia. Inti-intinya saja, nanti saya bergantian dengan rekan saya, izin, Yang Mulia.

845. KETUA: SALDI ISRA [01:16:58]

Silakan.

846. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:16:59]

Yang pertama adalah pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPPS. Jadi, dalam pelaksanaan Pilkada Fak Fak ini, Yang Mulia, ada pelanggaran Pasal 57 Undang-Undang 10 Tahun 2016, yang pada intinya itu terjadi di 2 distrik, 1 kelurahan, 7 kampung dengan jumlah TPS bermasalah sekitar 16 dan jumlah DPT keseluruhan TPS yang bermasalah adalah=6.101. Kami pun sudah mengajukan bukti-bukti, termasuk laporan Bawaslu, Yang Mulia.

Yang kedua adalah dalil kedua, poin B halaman 15, Yang Mulia. KPPS atau Termohon tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur, sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahan, Yang Mulia. Akibat pelanggaran ini yang terjadi di 4 distrik, 12 kampung, 2 kelurahan dengan TPS yang bermasalah dan 16 yang menyebabkan total surat suara yang bermasalah adalah=3.555 suara, Yang Mulia. Di sini, juga kami menegaskan bahwa pentingnya kesakralan kotak suara yang menjadi tempat terhormat pada pemilu, Yang Mulia.

Selanjutnya, untuk poin C selanjutnya, 20 ke bawah akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

847. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:18:26]

Izin, Yang Mulia.

848. KETUA: SALDI ISRA [01:18:30]

Ya.

849. KUASA HUKUM PEMOHON 188: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:18:30]

Melanjutkan pada poin C. Pelanggaran pemilih tidak berhak memilih mencoblos lebih dari satu surat suara, pemilih yang diwak ... diwakili oleh pemilih lain dan pemilih dengan domisi di luar kabupaten, yang terjadi pada ... terjadi di 2 distrik yang bermasalah, 2 kelurahan dan 2 TPS. Jumlah total suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah=1.046.

Selanjutnya, pelanggaran berupa adanya pemilihan yang diwakili oleh pemilih lain, yang terjadi di 4 distrik, 3 kelurahan, 2 kampung, dan 5 TPS. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah=1.717.

Selanjutnya, pelanggaran berupa adanya pemilih dengan domisi di luar Kabupaten Fak Fak. Dengan jumlah distrik bermasalah, 1 distrik, jumlah kelurahan bermasalah, 1 kelurahan, jumlah TPS bermasalah, 1 kelurahan, jumlah total suara-suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah=537 suara.

Pelanggaran berupa adanya pemilih di bawah umur, terjadi di 1 distrik, 1 kelurahan, 1 TPS, jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah=559 TPS.

Selanjutnya, adanya pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang terjadi.

850. KETUA: SALDI ISRA [01:20:00]

Di mana?

851. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:20:00]

Yang terjadi di ... sebentar, Yang Mulia. 12 ... TPS 12, Kelurahan Wagon.

852. KETUA: SALDI ISRA [01:20:06]

Oke.

853. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:20:14]

Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fak Fak.

Selanjutnya, Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah melakukan pelanggaran berupa pemberian uang, atau bentuk lain yang dilakukan secara bersama-sama, terencana, dan massif.

854. KETUA: SALDI ISRA [01:20:28]

Berapa banyak pemberian uangnya ini?

855. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:20:30]

Bagaimana, Yang Mulia?

856. KETUA: SALDI ISRA [01:20:32]

Berapa jumlah uangnya, yang dibagikan?

857. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:20:34]

Secara pastinya, kami tidak bisa pastikan, Yang Mulia. Tapi (...)

858. KETUA: SALDI ISRA [01:20:39]

Tapi ada pembagian uang, ya?

859. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:20:40]

Ada pembagian uang sejumlah Rp2.100.000,00 yang diserahkan kepada 1 orang, untuk dibagikan kepada 7 orang.

860. KETUA: SALDI ISRA [01:20:47]

Oke, jadi masing-masing dapat Rp300.000,00?

861. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:20:49]

Siap, Yang Mulia.

862. KETUA: SALDI ISRA [01:20:51]

Oke. Lanjut!

863. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:20:52]

Lanjut, Permohonan ke ... kehilangan hak untuk kampanye akibat ... permohonan kehilangan hak untuk kampanye akibat ketidakcermatan (...)

864. KETUA: SALDI ISRA [01:21:01]

Pemohon kehilangan hak, ya. Bukan permohonan yang kehilangan (...)

865. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:21:12]

Siap, Pemohon.

Pemohon kehilangan hak, untuk kampanye akibat ketidakcermatan Termohon dalam menjatuhkan diskualifikasi terhadap Pemohon.

866. KETUA: SALDI ISRA [01:21:12]

Oke.

867. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:21:12]

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Fak Fak Tahun 2024, Pemohon dinyatakan dibatalkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fak Fak Tahun 2024 sejak tanggal 10 November 2024 oleh Termohon.

Bahwa terhadap Pembatalan Pemohon, sebagaimana peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fak Fak Tahun 2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 1682 Tahun

2024 tentang Pengambilalihan Pengambilan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat. Dalam keputusan tersebut, KPU menyatakan bahwa Saudara Hendra Joenaedy Crisye Talla selaku Ketua, merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028, Saudara Marthen Luther Singgir, Saudara Mohammad Idris Rumata, Saudari Nur Hasmiah, dan Saudara Yosan Massa, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028 terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas, sehingga diberhentikan untuk sementara waktu. Dikarenakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak diberhentikan sementara ... mohon maaf, Komisi Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak.

868. KETUA: SALDI ISRA [01:22:47]

Oke.

869. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:22:48]

Bahwa sel ... bahwa setelah (...)

870. KETUA: SALDI ISRA [01:22:50]

Yang soal itu sudah dianggap ... apa ... Lanjut!

871. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:22:52]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

872. KETUA: SALDI ISRA [01:22:53]

Ya.

873. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:22:54]

Langsung Petikum, Yang Mulia.

874. KETUA: SALDI ISRA [01:22:55]

Ya, langsung.

875. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:22:56]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak Nomor 2831 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak Fak 2024, tertanggal 6 Desember 2024 adalah batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS-TPS yang ber ... yang tersebar di dis ... di 6 distrik, 6 kelurahan, 20 kampung, dan 40 TPS sebagai berikut.
 - 1) Distrik Fak Fak Tengah, Kelurahan Danaweria di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07 (...)

876. KETUA: SALDI ISRA [01:23:35]

Eggak usah dibacakan TPS nya, dianggap dibacakan (...)

877. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:23:38]

Dianggap dibacakan.

Selanjutnya Distrik Fak Fak, berikut Distrik Pariwari, berikut Distrik Furwagi, berikut Distrik Teluk Patipi, dan Distrik Tomage.

878. KETUA: SALDI ISRA [01:23:54]

Oke.

879. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:23:35]

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 6 distrik, 5 kelurahan, 20 kampung, dan 40 TPS sebagai berikut, anggap dibacakan, Yang Mulia.

880. KETUA: SALDI ISRA [01:24:05]

Ya.

881. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:24:06]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak untuk mengang ... mengangkat Ketua dan Anggota KPPS, serta Ketua dan Anggota PPK yang baru, bukan yang lama, pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut.

882. KETUA: SALDI ISRA [01:24:23]

Oke.

883. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:24:23]

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak beserta jajarannya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fak Fak Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak beserta jajarannya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak Fak Tahun 2024 ... 24.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.
Selesai, Yang Mulia.

884. KETUA: SALDI ISRA [01:25:04]

Cukup?

885. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:25:05]

Cukup, Yang Mulia.

886. KETUA: SALDI ISRA [01:24:05]

Yang Mulia Pak Ridwan, ada yang mau disampaikan? Cukup.

Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

887. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:11]

Ya, Pemohon, ini yang Anda maksud tidak melakukan verifikasi, ya. Ini pertama, pemilihnya punya C-6 apa tidak?

888. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:25:28]

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi pemilih itu ada yang memiliki C-6, ada yang tidak memiliki C-6.

889. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:34]

Oke, tapi yang memiliki C-6, kemudian datang ke TPS tidak dicocokkan, tidak dilihat.

890. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:25:42]

Tidak dicocokkan dengan (...)

891. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:43]

Begitu maksudnya?

892. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:25:43]

Ya yang ... benar.

893. KETUA: SALDI ISRA [01:25:45]

Oke, ya. Terus ini disebut bahwa ada pemilih yang sebetulnya tidak berhak memilih karena penduduk yang lain, dilaporkan ke Bawaslu. Apa tindak lanjut Bawaslu atas laporan itu?

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:25:57]

Semua laporan yang kami ajukan ke Bawaslu ada yang ditindaklanjuti.

895. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:00]

Ya, mana yang ditindaklanjuti?

896. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:26:03]

Yang ditindaklanjuti yang bukan terkait dengan pemilih yang tidak memiliki hak.

897. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:09]

Oke.

898. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:26:09]

Tapi yang ditindaklanjuti laporan yang lain.

899. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:12]

Ya, ini nanti Bawaslu direspons, ya. Apa yang ada dalam Permohonan, saya enggak tanya sekarang. Itu, ya.

900. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUNAEDI RANO WIRADINATA [01:26:20]

Siap, Yang Mulia.

901. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:26]

Oke, terima kasih, Pak Ketua.

902. KETUA: SALDI ISRA [01:26:24]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Terima kasih. Sekarang tukar pemainnya nah, itu. Tolong ... apa ... 256, Kuasa 256, 272, 33, mengambil posisi di depan. Silakan. Karena Pak Wakil Kamal sudah masuk, kita suruh pindah ke depan Pak Wakil Kamal, silakan.

Silakan. Kita mulai dari 256, Kabupaten Mimika. Silakan.

903. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:27:41]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Persidangan yang kami muliakan.

Selanjutnya atas perkenan Majelis Hakim, akan kami bacakan perihal permohonan yang diajukan.

Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 9 Desember, sebagaimana Registrasi Perkara Nomor 256, dianggap dibacakan.

Dengan ini, kami yang hadir dalam Persidangan ini, saya Julianto Asis bersama rekan, Rendy Saputra mewakili Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin selaku Pasangan Calon Nomor Urut 03 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Mengenai Kewenangan Mahkamah bahwa (...)

904. KETUA: SALDI ISRA [01:28:49]

Dianggap dibacakan, ya.

905. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:28:50]

Dianggap dibacakan.

906. KETUA: SALDI ISRA [01:28:51]

Berwenang (...)

907. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:28:52]

Mengenai Tenggang Waktu, Yang Mulia.

908. KETUA: SALDI ISRA [01:28:54]

Memenuhi (...)

909. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:28:55]

Keputusan KPU ini (...)

910. KETUA: SALDI ISRA [01:28:56]

Oke (...)

911. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:28:57]

Dibacakan di tanggal 9 (...)

912. KETUA: SALDI ISRA [01:28:59]

Ya.

913. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:29:00]

Pukul 23.34, kami mengajukan Permohonan di tanggal 11 Desember. Jadi, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan, Yang Mulia.

914. KETUA: SALDI ISRA [01:29:08]

Ya.

915. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:29:09]

Mengenai Kedudukan Hukum. Untuk Kabupaten Mimika, itu masuk kategori dengan syarat 1,5% untuk dapat mengajukan Permohonan.

Nah, untuk penghitungannya mengenai jumlah suara sah dari 1,5% itu=3.273 suara dan selisih kami, itu=3.679 suara atau 1,6%, tidak memenuhi, Yang Mulia.

Tetapi (...)

916. KETUA: SALDI ISRA [01:29:45]

Beda ... beda tipis, ya?

917. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:29:46]

Ya, Yang Mulia.

Tapi kami ingin mempertimbangkan bahwa hal tersebut bisa diperiksa bersama dengan pokok perkara dengan kejadian-kejadian yang

kami uraikan, pada pokoknya hampir bersama ... hampir sama intinya dengan pokok perkara, Yang Mulia.

918. KETUA: SALDI ISRA [01:30:03]

Ya (...)

919. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:30:04]

Adanya terjadi dua ... kami bagi jadi dua kejadian, Yang Mulia.
Yang pertama, itu pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta adanya TSM.

920. KETUA: SALDI ISRA [01:30:17]

Oke.

921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:30:18]

Mengenai pelanggaran Pasal 71. Bahwa Paslon Nomor 01 ini adalah Petahana, melakukan mutasi atau pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dengan beberapa ASN, sebagaimana angka 7 di posita kami itu, Yang Mulia, ada 12 ASN, Yang Mulia.

Itu semua terdiri dari Kasubag dan kepala seksi, dimutasi ke pelaksana di BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari sebelumnya dari kas ... kepala seksi dan kasubag, itu di tanggal 30 Juli atau dalam perhitungan setelah penetapan paslon itu, tidak cukup 2 bulan. Sementara, undang-undang hanya memperkenankan 6 bulan, 6 bulan, yang dilanggar itu di Pasal 71 ayat (2). Dan kami menganggap bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan-laporan kami yang seharusnya Paslon 01 ini, itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi KPU tetap melanjutkan proses pemilihan.

Adapun mengenai laporan-laporan ini, kami sudah laporkan, namun kami lebih uraikan di TSM, sebagaimana uraian tentang Bawaslu yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam menanggapi laporan-laporan yang kami ajukan.

922. KETUA: SALDI ISRA [01:30:52]

Oke.

923. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:30:53]

Adapun mengenai mutasi ini, Yang Mulia. Itu sudah ditindaklanjuti juga oleh Kemendagri, sudah ada surat. Dan memang diperintahkan untuk melakukan pembinaan terhadap ini dan ... dan ... apa ... dan BK ... BKD Provinsi Papua Tengah juga sudah membentuk tim bersama inspektorat untuk ... untuk menindaklanjuti SK mutasi yang diterbitkan oleh Johannes Rettob selaku petahana.

924. KETUA: SALDI ISRA [01:32:20]

Yang disuruh dibina itu siapa?

925. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:32:23]

Bupati, Yang Mulia, bupati ... tapi pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat itu sudah Plt, Yang Mulia, sudah Plt Sekda. Jadi yang sempat menda ... menghadapi ... apa ... proses pemeriksaan itu, sudah Plt Sekda, Yang Mulia, bukan lagi Pak Johannes Rettob. Tapi yang tanda tangan SK mutasi itu, masih Pak Johannes Rettob atau Bupati Paslon 01.

926. KETUA: SALDI ISRA [01:32:47]

Oke, lanjut.

927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:32:49]

Jadi, kami berpandangan, Yang Mulia. Bahwa untuk mempertimbangkan bahwa Paslon 01 ini, khususnya bupati ini melanggar Pasal 71 ayat (2) (...)

928. KETUA: SALDI ISRA [01:33:00]

Oke.

929. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:33:00]

Dan ayat (3) (...)

930. KETUA: SALDI ISRA [01:33:00]

Itu yang lain. Yang lain apa lagi?

931. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:33:01]

Mengenai TSM, Yang Mulia, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut rekan kami karena standby kemarin di sana, Yang Mulia, atas nama Rendy Saputra.

932. KETUA: SALDI ISRA [01:33:11]

Silakan.

933. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:33:13]

Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia, atas perkenannya.

Saya Rendy Saputra, salah satu Kuasa Hukum Paslon 03. Mohon izin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami.

Yang pertama. Bahwa Johannes Rettob selaku Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika telah melakukan beberapa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa istilah sistematis, terstruktur, dan masif, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa berbagai macam pelanggaran yang melibatkan Pasangan Urut 1 dan melibatkan orang lain, tetapi menguntungkan pasangan calon, sebagaimana diuraikan di bawah.

Yang pertama, ada ASN yang tidak netral. Ini terkait oknum ASN yang mengambil alih tugas dan kewenangan KPPS, mengusir, kemudian membagikan surat suara. Itu ada Bukti P-25 sampai P-29, ada intimidasi dari KPPS yang melarang beberapa masyarakat untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara.

Yang ketiga, itu soal penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional.

Yang pertama tadi, yang sudah disampaikan oleh rekan saya (...)

934. KETUA: SALDI ISRA [01:34:25]

Oke, itu sudah, ya. Lanjut, money politics.

935. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:34:31]

Yang masuk dalam Permohonan terkait money politics, itu ada praktik bagi-bagi uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Selanjutnya, dalam beberapa laporan juga yang telah kami laporkan di Bawaslu, ada praktik money politics dalam bentuk pembagian beras maupun balon[sic!].

936. KETUA: SALDI ISRA [01:34:52]

Itu pembagian beras, di poin berapa itu ditulis?

937. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:34:56]

Ini kami akan masukkan sebagai bukti (...)

938. KETUA: SALDI ISRA [01:34:59]

Eh (...)

939. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:34:59]

Tambahan, Yang Mulia.

940. KETUA: SALDI ISRA [01:35:00]

Kalau tidak ada dalam Permohonan, jangan disampaikan.

941. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:35:01]

Siap.

942. KETUA: SALDI ISRA [01:35:02]

Kan, sudah diingatkan tadi.

943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:35:03]

Siap, Yang Mulia.

944. KETUA: SALDI ISRA [01:35:04]

Yang disampaikan itu apa yang ditulis dalam Perbaikan Permohonan.

945. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:35:08]

Siap, Yang Mulia.

946. KETUA: SALDI ISRA [01:35:09]

Lanjut.

947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:35:10]

Yang kedua, terkait Pasal 71 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang tidak ditindaklanjuti. Kami menganggap sikap Bawaslu Kabupaten Mimika dalam merespons laporan masyarakat berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 yang melibatkan Pasangan Nomor Urut 1, diduga kuat adalah merupakan bentuk keberpihakan Bawaslu Mimika selaku penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa dampak dari keberpihakan tersebut mencederai terhadap integritas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Hal ini tidak hanya dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang keseluruhan merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 tentang pentingnya netralitas penyelenggara Pemilu, serta mengacu pada standar pelanggaran TSM.

Bahwa dugaan Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak pada Paslon Nomor Urut 1, bukan hanya ditujukan pada penanganan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, melainkan juga ditunjukkan dalam beberapa laporan penanganan pelanggaran lainnya. Terutama jika laporan tersebut, jika laporan masyarakat yang terlapornya adalah Pasangan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong.

Bahwa Pemohon beserta masyarakat telah mengajukan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Johannes Rettob kepada Bawaslu Kabupaten Mimika. Namun, laporan tersebut ditolak begitu saja dan tidak diregistrasi, dengan alasan hukum yang cukup untuk itu.

Penolakan tersebut dilakukan tanpa disertai alasan hukum yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun laporan-laporan yang kami ajukan telah dilengkapi dengan bukti-bukti substansial, konkret dan tidak terbantahkan.

Bahwa sikap Bawaslu tersebut menunjukkan beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, terdapat pengabaian terhadap kewajiban Bawaslu.

948. KETUA: SALDI ISRA [01:37:00]

Oke. 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

949. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:37:01]

Mohon dianggap dibacakan.

Ada beberapa laporan-laporan, saya hanya (...)

950. KETUA: SALDI ISRA [01:37:07]

Oke, semua laporan itu selesai, ya?

951. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:37:09]

Kasih contoh.

952. KETUA: SALDI ISRA [01:37:10]

Nanti biar ... biar kita dalam dan dijawab oleh Bawaslu nanti.
Apa lagi, ada yang lain?

953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:37:24]

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas terdapat pelanggaran Pilbup Mimika yang nyata dan mempengaruhi hasilnya secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya berwenang.

954. KETUA: SALDI ISRA [01:37:35]

Oke.

955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:37:36]

Bahwa dengan terbuktinya Calon Johannes Rettob sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang melakukan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka Termohon harus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dan Keputusan KPU Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika.

Bahwa apabila tidak terdapat pertimbangan hukum yang cukup untuk mengakomodir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ada.

Kemudian, membatalkan perolehan suara dan Pencalonan Nomor Urut 1 karena telah melanggar dan diuntungkan atas terjadinya pelanggaran TSM, maka sepatutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 haruslah diulang.

Bahwa berdasarkan pada apa yang terurai, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Saya langsung lanjut di Petitum, untuk memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

956. KETUA: SALDI ISRA [01:38:44]

Oke.

957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:38:45]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Johannes Rettob dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan.
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan di Timika pada hari Senin, tanggal 9 Desember, Pukul 23.34.
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Wakil Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika

Tahun 2024, tertanggal 24 Oktober dan Keputusan KPU Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut.

5. Menetapkan perolehan suara hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang benar sebagai berikut.
 - 1) Pasangan Nomor Urut 1 Johannes Rettob dan Emanuel Kemong dengan perolehan suara 0 akibat diskualifikasi.
 - 2) Pasangan Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi dengan 66.266[sic!] suara.
 - 3) Pemohon Aleksander Omaleng dan Yusuf Rombe=74.139 suara. Dengan total suara sah=140.407 suara.

958. KETUA: SALDI ISRA [01:40:00]

Oke.

959. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENDY SAPUTRA [01:40:00]

6. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika, untuk melaksanakan putusan ini.
Dan/atau
 1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor 2, Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Nomor 3, Aleksander Omaleng, sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru, termasuk memberikan kesempatan bagi Emanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan.
 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam tenggat waktu 120 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan, serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang dan melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka 7 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang.
 3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Kabupaten Mimika, dalam rangka pelaksanaan amar putusan dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi.
 4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI, untuk melakukan supervisi dan koordinasi kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Kabupaten Mimika, dalam rangka pelaksanaan amar putusan dan melaporkan hasil pengawasannya.
 5. Merintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, terkhusus Kepolisian Daerah Provinsi Papua Tengah dan

Kepolisian Resort Kabupaten Mimika, untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati Kabupaten Mimika, sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

960. KETUA: SALDI ISRA [01:41:34]

Oke, coba Anda lihat di Petitum halaman 20, itu apa yang dimaksud dan/atau yang di situ?

961. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:41:34]

Izin, Majelis. Jadi ini kami bersifat kumulatif, kami juga bersifat alternatif, tergantung nanti pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia. Berdasarkan permohonan-permohonan yang kami ajukan, Yang Mulia.

962. KETUA: SALDI ISRA [01:42:02]

Oke, nanti akan kita pertimbangkan, ya. Biasanya kan alternatif.

963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:42:07]

Ya, Yang Mulia.

964. KETUA: SALDI ISRA [01:42:08]

Nah, ini kumulatif, alternatif.

965. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:42:07]

Siap, Yang Mulia.

966. KETUA: SALDI ISRA [01:42:08]

Nah, itu satu. Kalau begitu, angka satu di kumulatif alternatif itu untuk kumulatif atau alternatif terhadap apa, Pak?

967. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:42:17]

Sebenarnya alternatif ini, Yang Mulia. Ini (...)

968. KETUA: SALDI ISRA [01:42:21]

Bukan, jangan diubah-ubah!

969. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:42:24]

Ya, makanya, Yang Mulia. Kami juga sudah diperingatkan tadi, makanya kalau di (...)

970. KETUA: SALDI ISRA [01:42:29]

Bukan, oke alternatif. Angka satu itu alternatif terhadap angka berapa?

971. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:42:30]

Izin, Yang Mulia?

972. KETUA: SALDI ISRA [01:42:34]

Angka satu di alternatif itu, itu alternatifnya terhadap apa?

973. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:42:35]

Alternatif dari rangkaian Petikum kami yang di awal ke angka satu ke angka ... sampai angka enam atau ke alternatif angka satu sampai angka lima itu, Yang Mulia.

974. KETUA: SALDI ISRA [01:43:01]

Oke, jadi kalau tidak di atas dipakai, di bawah dipakai begitu?

975. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:43:01]

Begitu, Yang Mulia.

976. KETUA: SALDI ISRA [01:43:01]

Oke, tapi yang tertulisnya tidak begitu, kan?

977. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [01:43:02]

Ya, Yang Mulia.

978. KETUA: SALDI ISRA [01:43:04]

Oke, cukup, Yang Mulia Pak Arsul, Yang Mulia Pak Ridwan?
Cukup, ya.
272, silakan.

979. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:43:24]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Kami Kuasa Hukum Maxsimus Tipigau dan Peggi Patricia Pattipi,
Nomor Urut 2.

980. KETUA: SALDI ISRA [01:43:24]

Ya.

981. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:43:39]

Mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2004[sic!] yang tanggal 9 Desember 2004[sic!]. Oleh karena yang dimohonkan itu adalah penetapan hasil Pilkada, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 158, disyaratkan dalam perkara ini adalah 1,5, maka 1,5 itu adalah 3.273 suara, sedangkan suara Pemohon adalah 66.0 ... 66.268, sedangkan Pihak Terkait=77.818, maka selisihnya adalah 11.550 suara. Sehingga tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang. Namun karena telah terjadi pelanggaran serius dan signifikan berupa pelanggaran terhadap Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2006, dan lebih dahsyat lagi telah terjadi pelanggaran praktik serius ... praktik serius kecurangan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, di mana seluruh jumlah surat suara DPT telah dicoblos. Jadi 100% surat suara DPT dicoblos,

surat suara cadangan 25% juga dicoblos, bahkan surat suara cadangan lebih dari 25% pun dicoblos.

982. KETUA: SALDI ISRA [01:45:32]

Di semua TPS?

983. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:45:33]

Ini, Yang Mulia. Ada (...)

984. KETUA: SALDI ISRA [01:45:37]

TPS mana saja?

985. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:45:38]

Yang di Mimika itu jumlah distriknya adalah 18 distrik, 11 distrik itu lebih dari 100%. Jadi dicoblos DPT-nya 100%, kemudian surat suara cadangannya dicoblos, bahkan lebih dari surat cadangan dicoblos. Ada yaitu di Distrik Agimuga, Mimika Timur, Mimika Barat, Jita, Distrik Jila, Mimika Timur, Tembagapura, Mimika Barat Jauh, Kwamki Narama, Alama, Amar. Ini semuanya adalah 100% DPT-nya dicoblos, surat suara cadangannya dicoblos, bahkan lebih ... kelebihan dari surat cadangan juga dicoblos. Jadi melebihi 100% di 11 kecamatan. Kemudian, ada juga Distrik Hoya, Distrik Hoya DPT-nya 100 ... DPT-nya juga 100%, persis sama dengan jumlah DPT.

Kemudian sisanya dari 6 ... 6 distrik, Mimika, Iwaka, Mimika Barat, Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Wania, sebagian besar juga di TPS-nya hampir 100% mencoblos, tapi tidak 100% di 6. Jadi, 11% melebihi 100%, 1 ... apa ... 11 distrik melebihi 10%, 1 distrik sama dengan jumlah DPT, 6 mendekati 100%.

Itu, Yang Mulia. Sehingga ini bagi kami jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip ... prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

986. KETUA: SALDI ISRA [01:47:27]

Halo, hp-nya siapa itu? Bapak ... Bapak keluar dulu, Pak!
Silakan.

987. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:47:40]

Menurut Pemohon, jelas-jelas pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mimika ini melanggar prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dijamin atau diamanahkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 1945 ... Undang-Undang Dasar 1945.

988. KETUA: SALDI ISRA [01:47:59]

Pak Wakil Kamal, berapa TPS yang 100% itu pemilih DPT-nya? Dihitung, enggak?

989. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:48:05]

Kami hitung, Yang Mulia.

990. KETUA: SALDI ISRA [01:48:07]

Berapa semuanya?

991. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:48:08]

Dari seluruh ... kami yang pasti, distrik tadi, masih menghitung distrik, ada 11 distrik yang 100%, semuanya (...)

992. KETUA: SALDI ISRA [01:48:16]

Ya, dari yang Bapak hitung itu berapa TPS yang 100% itu?

993. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:48:21]

11 distrik, saya (...)

994. KETUA: SALDI ISRA [01:48:23]

Bukan, ini TPS-nya ... kan, basisnya kan TPS.

995. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:48:25]

TPS-nya jumlahnya semuanya ... sebentar, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia. Distriknya 18 distrik.

996. KETUA: SALDI ISRA [01:48:51]

Ya.

997. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:48:51]

Yang 100% ... yang melebihi 100% 11 distrik, yang sama dengan DPT itu 1 distrik. Enamnya itu sebagian besar juga (...)

998. KETUA: SALDI ISRA [01:49:00]

Ya, sekarang TPS-nya berapa?

999. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:49:02]

Jumlah TPS-nya 497 TPS, Yang Mulia.

1000. KETUA: SALDI ISRA [01:49:05]

Itu 100%?

1001. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:49:06]

Enggak, tidak 100%. Ada dari 6 distrik itu yang tidak 100%. Saya sebutkan tadi seperti mimi ... miming ... apa ... Mimika Tengah (...)

1002. KETUA: SALDI ISRA [01:49:10]

Oke.

1003. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:49:16]

Iwaka (...)

1004. KETUA: SALDI ISRA [01:49:17]

Paling tidak, dari yang Bapak identifikasi dalam Permohonan ini kan, ada nih semuanya, nih. Berapa jumlah (...)

1005. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:49:20]

Ada, kami uraikan te ... distriknya disebutkan, Yang Mulia.

1006. KETUA: SALDI ISRA [01:49:24]

Ya, TPS-nya yang paling saya penting ini.

1007. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:49:26]

Ya, di Mimika Baru, itu Mimika Baru itu, di Mimika Baru ada 127 (...)

1008. KETUA: SALDI ISRA [01:49:33]

TPS?

1009. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:49:34]

TPS dari 186. Ini ibu kota dari Mimika, Yang Mulia.

1010. KETUA: SALDI ISRA [01:49:38]

Jadi, 127 itu 100%?

1011. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:49:42]

Ya, 100%. Dari 186 TPS di Mimika, di kota ini, Yang Mulia. Nah, itu yang terjadi. Jadi, hanya 6 ... 6 distriklah yang tidak 100%, tapi hampir 99 koma sekian persen, Yang Mulia.

1012. KETUA: SALDI ISRA [01:49:56]

Oke.

1013. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:49:56]

Rata-rata, ya. Itu, Yang Mulia.

Itulah kenapa perbedaan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait karena ada pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip luber dan jurdil itu, maka mohon Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, agar kemudian diperiksa secara bersama-sama dengan Pokok Perkara, Yang Mulia.

1014. KETUA: SALDI ISRA [01:50:22]

Itu semua TPS-nya dimunculkan, ya?

1015. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:50:24]

Ya.

1016. KETUA: SALDI ISRA [01:50:25]

Ada untuk buktinya?

1017. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:50:26]

Ada yang ... kami kalau di TPS karena saksi kami di beberapa tempat yang nol, nanti akan di ... di Pokok Perkara kami jelaskan (...)

1018. KETUA: SALDI ISRA [01:50:36]

Bukan, maksud saya, TPS-TPS yang diklaim 100% atau lebih itu ada di ... di ... disampaikan buktinya semua?

1019. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:50:43]

Ya, karena ada di D.Hasil Kecamatan, Yang Mulia.

1020. KETUA: SALDI ISRA [01:50:49]

Oke.

1021. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:50:49]

100% ada D.Hasil Kecamatan, semua lengkap.

1022. KETUA: SALDI ISRA [01:50:51]

Oke.

1023. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:50:52]

Sebagian besar kami tidak mendapatkan C.Hasil tingkat TPS, karena yang ... karena diintimidasi. Kami juga tidak bisa memfoto dokumen-dokumen seperti C.Plano yang besar, termasuk C.Daftar Hadir. Itu yang penting, C.Daftar Hadir untuk memverifikasi keabsahan pemilih karena itu adalah kewajiban dari penyelenggara pemilu untuk ... apa ... menyiapkan C.Daftar Hadir, supaya bisa memvalidasi, siapa-siapa yang kemudian yang menggunakan hak pilihnya dari setiap TPS. Tapi kami enggak dikasih kesempatan untuk foto dan sebagainya, mungkin (...)

1024. KETUA: SALDI ISRA [01:51:23]

Oke.

1025. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:51:23]

Mungkin perlu dikonfirmasi kepada Termohon maupun Bawaslu, Yang Mulia.

1026. KETUA: SALDI ISRA [01:51:29]

Lanjut!

1027. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:51:30]

Saya kira itu. Oleh karena itu, maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon tentunya mempunyai legal standing, Yang Mulia.

1028. KETUA: SALDI ISRA [01:51:42]

Oke.

1029. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:51:43]

Berkaitan dengan Tenggang Waktu Permohonan. Karena ditetapkan tanggal 9, Permohonan ... Permohonan kami tanggal 11, masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, selanjutnya di ... Pokok Perkara untuk sementara dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

1030. KETUA: SALDI ISRA [01:51:55]

Silakan!

1031. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI FATONAH NUR HIDAYAH [01:51:55]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Saya langsung terkait dengan Pokok Perkara, terbagi jadi 2, ini salah satunya, yaitu melanggar Pasal 71. Mungkin untuk detailnya tadi sudah dijelaskan (...)

1032. KETUA: SALDI ISRA [01:52:07]

Itu sudah selesai, ya?

1033. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI FATONAH NUR HIDAYAH [01:52:08]

Ya, jadinya mungkin ini yang terkait dengan kami. Kami sudah mengajukan laporan ke Bawaslu dan pemberitahuan status laporan itu adalah bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilih dan pidana pemilihan.

Yang kedua adalah merupakan potensi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Dan selain itu, dari pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melakukan koordinasi bersama inspektorat dan BKPSDM yang sudah menyam ... yang sudah menyampaikan temuan hasil, tidak saya bacakan secara keseluruhan, itu ada di poin 16, halaman 15, Majelis.

1034. KETUA: SALDI ISRA [01:52:52]

Ya, itu kalau soal syarat sudah, ya?

1035. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI FATONAH NUR HIDAYAH [01:52:55]

Ya, sudah.

1036. KETUA: SALDI ISRA [01:52:56]

Itu dianggap selesai, biar nanti kami yang menilainya.

1037. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI FATONAH NUR HIDAYAH [01:52:58]

Baik.

1038. KETUA: SALDI ISRA [01:52:59]

Langsung sekarang surat-surat suara yang apa itu ... yang berisi penuh itu.

1039. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI FATONAH NUR HIDAYAH [01:53:03]

Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Wakil.

1040. KETUA: SALDI ISRA [01:53:06]

Oke.

1041. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:53:06]

Langsung B, Yang Mulia.

1042. KETUA: SALDI ISRA [01:53:10]

Ya.

1043. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:53:10]

Halaman 17, pelanggaran serius ... pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia lubur ... luber, serta jujur dan adil, dan pelanggaran serius terhadap sistem Pemilihan One Man One Vote di Kabupaten Mimika.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU (...)

1044. KETUA: SALDI ISRA [01:53:28]

Ini semuanya tadi, ya. Yang berkait dengan TPS-TPS dan di distrik-distrik itu, ya?

1045. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:53:33]

Ya ... ya, Yang Mulia.

1046. KETUA: SALDI ISRA [01:53:35]

Itu sampai halaman?

1047. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:53:38]

Terakhir, Yang Mulia.

1048. KETUA: SALDI ISRA [01:53:39]

Oke.

1049. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:53:40]

Yang terakhir, Yang Mulia, ini.

1050. KETUA: SALDI ISRA [01:53:40]

Kalau begitu langsung Petitem, Pak.

1051. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:53:44]

Enggak ... ada, Yang Mulia, supaya ada tayangan.

1052. KETUA: SALDI ISRA [01:53:45]

Ya.

1053. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:53:46]

Supaya kita meyakinkan, Yang Mulia. Ada tayangan PPT kami.

1054. KETUA: SALDI ISRA [01:53:51]

Silakan.

1055. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:53:51]

Telah disiapkan, PPT halaman 13.

1056. KETUA: SALDI ISRA [01:53:54]

Silakan, PPT halaman 13. Ini apa nih, Pak, yang mau diceritakan?

1057. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:54:09]

Bahwa ... oh, di distrik ... di beberapa distrik itu adalah KPPS itu mencoblos sisa surat suara. Itu kenapa 100%? Pertanyaan kita itu, kenapa 100%? Karena rata-rata KPPS itu mencoblos sisa suara.

1058. KETUA: SALDI ISRA [01:54:29]

Coba diulangi lagi ini! Ini diberikan ke nomor berapa suaranya yang dicoblos? Sebentar. Nah, coba kita lihat.

1059. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:54:40]

Oh. Yang ini, Yang Mulia.

1060. KETUA: SALDI ISRA [01:54:41]

Ya.

1061. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:54:42]

Di ami ... di Agimuga ini.

1062. KETUA: SALDI ISRA [01:54:44]

Ya.

1063. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:54:45]

Seratu ... bahkan 100%, bahkan termasuk surat cadangan itu diberikan kepada 01, Yang Mulia.

1064. KETUA: SALDI ISRA [01:54:51]

Oke.

1065. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:54:52]

Pasangan Nomor Urut 2, Nomor Urut 3=0. Jadi, seolah-olah sistemnya adalah sistem noken. Padahal dalam Peraturan KPU kan di dalangi[sic!], selain Nabire dan Mimika tidak ada sistem noken lagi, sudah sistem one man one vote, Yang Mulia.

1066. KETUA: SALDI ISRA [01:55:07]

Oke, lanjut.

1067. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:55:09]

Kemudian, Distrik Kwamki Narama, halaman 12. Mohon ditayangkan.

1068. KETUA: SALDI ISRA [01:55:25]

Tadi 13, sekarang 12?

1069. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:55:26]

Ya.

1070. KETUA: SALDI ISRA [01:55:27]

Ini masih orang yang tadi ini, Pak?

1071. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:55:29]

Lain, Yang Mulia.

1072. KETUA: SALDI ISRA [01:55:29]

Oh, lain?

1073. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:55:30]

Lain.

1074. KETUA: SALDI ISRA [01:55:30]

Oke.

1075. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:55:30]

Ini adalah KPPS mencoblos sisa surat suara, itu yang dapat kami ... ada kami rekam, Yang Mulia.

1076. KETUA: SALDI ISRA [01:55:42]

Oke. Lanjut, apa lagi?

1077. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:55:43]

Kemudian, di ... terakhir, Yang Mulia, di Mimika Baru. Halaman ... nah itu, Yang Mulia. Juga demikian, sisa surat suara dicoblos, dihabisin semua (...)

1078. KETUA: SALDI ISRA [01:56:02]

Tapi tidak dibagi adil, ya?

1079. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:05]

Enggak ngerti kita yang di lapangan seperti apa yang terjadi, tapi itu contoh kenapa pemilih itu melebihi 100%. Di antaranya itu bahkan ada dalil kami, itu di satu TPS itu, orang datang udah selesai pemilihan, Yang Mulia.

1080. KETUA: SALDI ISRA [01:56:21]

Oke (...)

1081. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:22]

Ya, jadi gitu (...)

1082. KETUA: SALDI ISRA [01:56:23]

Ini kayaknya daripada surat suara mubazir, me ... mending, diji ... diisi (...)

1083. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:25]

Kira-kira, Yang Mulia (...)

1084. KETUA: SALDI ISRA [01:56:27]

Silakan!

1085. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:28]

Itu, kira-kira. Jadi, sudah langsung ke Petitem, Yang Mulia.

1086. KETUA: SALDI ISRA [01:56:33]

Silakan!

1087. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:34]

Karena, sudah terang-benderang, mohon (...)

1088. KETUA: SALDI ISRA [01:56:36]

Jangan, di ... dipengaruhi Hakim, Pak ... Pak Wakil Kamal. Ya.

1089. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

1090. KETUA: SALDI ISRA [01:56:41]

Itu offset namanya kalau begitu, tugas Para Pihak itu menyajikan fakta, nanti kami yang menilai.

1091. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:56:48]

Meyakinkan, Yang Mulia.

1092. KETUA: SALDI ISRA [01:56:49]

Ya, saya yakin atau tidak, itu urusan di sebelah sini.
Silakan, Petitum!

1093. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI FATONAH NUR HIDAYAH [01:56:54]

Oke, Petitum.

Berdasarkan, seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 23.00 WIT.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob-Emanuel Kemong sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024.
4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob-Emanuel Kemong.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau-Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Aleksander Omaleng-Yusuf Rombe.

Atau,

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024.
2. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh Komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh PPD, seluruh PPS, seluruh KPPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independen dan tidak profesional.
3. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh pengawas distrik dan seluruh pengawas TPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independen dan tidak profesional.
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi-KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.
7. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpe ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Itu yang kami sampaikan. cukup, Majelis. Wassalamualaikum wr. wb.

1094. KETUA: SALDI ISRA [02:00:23]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, ya.
Pak Ridwan, cukup? Pak Arsul? Silakan.

1095. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:30]

Terima kasih. Sedikit saja.
Saudara Pemohon, ya. Itu tadi pelanggaran-pelanggaran itu kemudian dilaporkan enggak, ke Bawaslu?

1096. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [02:00:39]

Kami keberatan seluruh ... di seluruh distrik, ketika rekapitulasi berkaitan dengan hal tersebut dan sebagian ada rekomendasi, beberapa TPS ada rekomendasi dan kami laporkan juga, sebagian.

1097. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:54]

Sebagian itu berapa TPS?

1098. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI FATONAH NUR HIDAYAH [02:01:05]

Izin, Yang Mulia, saya membantu menjawab.
Kalau ... kalau untuk rekomendasi TPS itu, kami memang tidak melapor yang terkait TPS, tapi lebih ke distrik.

1099. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:17]

Ya. Ya, makanya, ap ... ap ... apa respons Bawaslu yang diterima oleh Pemohon?

1100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI FATONAH NUR HIDAYAH [02:01:21]

Tidak ada rekomendasi.

1101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:24]

Tidak ada rekomendasi?

1102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI FATONAH NUR HIDAYAH [02:01:24]

Tidak ada.

1103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:24]

Oke. Nanti ini Bawaslu ditanggapi, ya, semuanya, yang disampaikan oleh ... apa ... Pemohon tadi.
Terima kasih, Pak Ketua.

1104. KETUA: SALDI ISRA [02:01:33]

Terima kasih.

Jadi, ini Termohon, mana nih, KPU Mimika? Oke. Tolong nanti tuh, dijawab semua itu, ya.

Bawaslu Mimika mana? Oke, dijawab juga.

Ini kalau mendengar mereka saja, ini Anda berpihak katanya, gitu. Nah ini kan, baru mendengar mereka ini. Nanti kita dengar pula yang dari Termohon, dari Bawaslu, nanti penjelasan Pihak Terkait. Supaya seimbang semuanya, dengan bukti-bukti yang kuat, gitu. Paham, ya, Bawaslu, ya? Oke, terima kasih, selesai. Mimika dua Permohonan, selesai.

Sekarang terakhir untuk pagi hari ini, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33, silakan.

1105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:02:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1106. KETUA: SALDI ISRA [02:02:23]

Walaikumsalam wr. wb.

1107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:02:26]

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Agussyah Ramadani dan Tri Sandi Muji, Kuasa Hukum dari Ariwobo dan Azwar Sazali Tanjung, Paslon Nomor 3, Calon Bupati Labuhanbatu Selatan, Pilkada Tahun 2024.

1108. KETUA: SALDI ISRA [02:02:50]

Ini berapa pasangan calon di situ, Pak?

1109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:02:52]

Ada tiga, Yang Mulia.

1110. KETUA: SALDI ISRA [02:02:23]

Nah, itu yang satu lagi berapa perolehan suaranya? Ini kan, nomor satu dan nomor tiga saja.

1111.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:02:59]

Ya, Yang Mulia, kami dicantumkan (...)

1112.KETUA: SALDI ISRA [02:03:00]

Yang nomor dua berapa perlengkapan suaranya, Pak?

1113.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:01]

Yang pasangan ... Paslon Nomor 2=28.317, Yang Mulia.

1114.KETUA: SALDI ISRA [02:03:06]

Dua?

1115.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:07]

28.317.

1116.KETUA: SALDI ISRA [02:03:12]

28 ... 28.317, ya?

1117.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:14]

Betul, Yang Mulia.

1118.KETUA: SALDI ISRA [02:03:16]

28.317. Soalnya di Permohonan Bapak, ini hanya satu dan tiga saja, kan ndak apa-apa juga menyebut orang lain di situ (...)

1119.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:23]

Ya, betul.

1120.KETUA: SALDI ISRA [02:03:24]

Ada pasangan calon lain.

1121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:24]

Ya.

1122. KETUA: SALDI ISRA [02:03:25]

Eenggak boleh pelit-pelit juga, Pak, ya.

1123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:28]

Kami menyebut Pihak Terkait saja, Yang Mulia.

1124. KETUA: SALDI ISRA [02:03:29]

Bukan, supaya lengkap ini, bisa diteropong suaranya.

1125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:32]

Baik.

1126. KETUA: SALDI ISRA [02:03:33]

Silakan.

1127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan, ya, Yang Mulia.

1128. KETUA: SALDI ISRA [02:03:40]

Ya.

1129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:44]

Kemudian (...)

1130. KETUA: SALDI ISRA [02:03:45]

Kapan diumumkan ini? Ditetapkan dan diumumkan?

1131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:49]

Ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 oleh KPU (...)

1132. KETUA: SALDI ISRA [02:03:53]

Ya, hari Selasa, ya? (...)

1133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:54]

Kemudian, kami mengajukan Permohonan tanggal 5 Desember (...)

1134. KETUA: SALDI ISRA [02:03:45]

Tanggal 5 (...)

1135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:03:54]

2024 (...)

1136. KETUA: SALDI ISRA [02:04:00]

Tiga, empat, lima. Oke, lanjut.

1137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:04:03]

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon.

1138. KETUA: SALDI ISRA [02:04:07]

Ya.

1139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:04:08]

Yang Mulia. Bahwa dari ketentuan Pasal 158, sebenarnya ambang batas selisih suara untuk mengajukan Permohonan ini tidak memenuhi dari sisi presentasinya. Tetapi karena ada beberapa alasan-alasan kami yang menurut kami ini sangat signifikan dan fundamen lah. Sehingga mohon Yang Mulia, bisa mengenyampingkan soal ketentuan ambang batas ini dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Langsung saja, Yang Mulia, kami bagian Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1140. KETUA: SALDI ISRA [02:04:52]

Ya.

1141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:04:56]

Di Permohonan ini kami mengkualifikasikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Labusel dan alasan ini juga kami meminta kepada Yang Mulia untuk mengenyampingkan ambang batas yang kami maksud tadi.

Bahwa klasifikasi pelanggaran yang kami maksud adalah adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Bupati, Paslon, dan Aparatur Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai kepada kepala-kepala dusun dalam rangka kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

1142. KETUA: SALDI ISRA [02:05:47]

Ini Nomor Urut 1 incumbent, ya?

1143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:05:48]

Bukan, Yang Mulia.

1144. KETUA: SALDI ISRA [02:05:50]

Apa ini?

1145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:05:52]

Dia ... dari bukan incumbent.

1146. KETUA: SALDI ISRA [02:05:55]

Ada incumbent enggak yang ikut?

1147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:05:56]

Enggak ada, Yang Mulia.

1148. KETUA: SALDI ISRA [02:05:58]

Oke. Pemain baru semua, ya?

1149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:06:00]

Betul.

1150. KETUA: SALDI ISRA [02:06:01]

Oke.

1151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:06:02]

Kemudian ada ... menurut kami, ada kesengajaan atau pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap praktik-praktik pelanggaran money politics tersebut, sehingga merugikan kepentingan kami, Nomor Urut 3.

1152. KETUA: SALDI ISRA [02:06:20]

Oke. Apa lagi?

1153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:06:21]

Kemudian, ada tindakan-tindakan teknis, Termohon KPU atau Bawaslu, dalam hal yang nanti akan kami uraikan, yang itu merupakan berdampak merugikan kepentingan kami.

Kemudian, praktik money politics ini juga dibarengi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Paslon Nomor 1 yang dengan melakukan intimidasi kepada kepala dusun, yang tidak mau membantu mendukung Paslon Nomor 1, nanti akan dipecat dan diminta untuk membuat surat pernyataan, kalau enggak mau mendukung.

Kemudian, biaya besaran uang yang dibagikan kepada pemilih itu, di sekitar Rp200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00, Yang Mulia, kepada pemilih. Dan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang, dan Kecamatan Sei Kanan.

1154. KETUA: SALDI ISRA [02:07:29]

Berapa banyak dibagikan uangnya, Pak?

1155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:07:31]

Rp200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00, Yang Mulia.

1156. KETUA: SALDI ISRA [02:07:34]

Ya, itu jumlahnya Rp300.000,00 sampai Rp200.000,00.

1157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:07:37]

Ya.

1158. KETUA: SALDI ISRA [02:07:38]

Jumlah orang yang menerima?

1159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:07:41]

Kalau jumlah orang yang menerima, kita tidak bisa menghimpun jumlahnya, Yang Mulia. Tetapi sebarannya kita bisa buktikan, itu terjadi di kecamatan-kecamatan yang ada di (...)

1160. KETUA: SALDI ISRA [02:07:52]

Bagaimana cara membuktikannya itu, Pak?

1161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:07:54]

Ada nanti, kalau ini diperkenankan, nanti kami akan menghadirkan saksi kalau misalnya ini sampai berlanjut, Yang Mulia.

1162. KETUA: SALDI ISRA [02:08:02]

Ya, kalau saksi kan, tidak mungkin dihadirkan semua orang, Bapak. Dibawa orang se-Labuhanbatu untuk menerangkan di sini. Gimana caranya Bapak mengatakan bahwa itu semua ... sebagian besar orang menerima itu? Apa yang bisa dijadikan buktinya?

1163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:08:17]

Ada foto, ada video, ada kemudian saksi yang nanti mungkin yang mewakili ke ... apa ... kelurahan dan kecamatan (...)

1164. KETUA: SALDI ISRA [02:08:21]

Oke.

1165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:08:24]

Dan, kemudian nanti pernyataan-pernyataan, Yang Mulia.

1166. KETUA: SALDI ISRA [02:08:24]

Oke, lanjut!

1167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:08:27]

Kemudian, terhadap praktik money politics yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, itu menurut hemat kami sudah termasuk vulgar dan cukup diketahui khalayak, Yang Mulia. Dan ini terjadi pembiaran oleh penyelenggara pemilu.

1168. KETUA: SALDI ISRA [02:08:49]

Anda laporkan, enggak? Ada dilaporkan ndak ini ke Bawaslu?

1169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:08:52]

Ada, Yang Mulia. Di angka ... di poin 21.

1170. KETUA: SALDI ISRA [02:08:55]

Halaman berapa?

1171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:08:55]

Di halaman 8, Yang Mulia.

1172. KETUA: SALDI ISRA [02:09:00]

Halaman 8, sebentar saya cek. Oke, ini laporan semua, ya?

1173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:09:11]

Ya betul, Yang Mulia. Ada sekitar 10 laporan yang kita identifikasi dari tim.

1174. KETUA: SALDI ISRA [02:09:17]

Ya.

1175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:09:18]

Dan, Yang Mulia. Bahwasan (...)

1176. KETUA: SALDI ISRA [02:09:18]

Ini, laporannya tentang apa saja ini?

1177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:09:22]

Tentang terkait money politics, Yang Mulia, terjadi beberapa tempat.

1178. KETUA: SALDI ISRA [02:09:26]

Dugaan melaporkan, dan juga money politics. Bawaslu mana, Labuhanbatu Selatan?

1179. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:09:28]

Ya, Yang Mulia.

1180. KETUA: SALDI ISRA [02:09:31]

Betul ada laporan ini? Ada laporan 053, 058, 061, 62, 65, 69, 071, 072, 074, 075. Betul?

1181. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:09:44]

Baik, Yang Terhormat Majelis.

1182. KETUA: SALDI ISRA [02:09:47]

Bukan! Jawab ya atau tidak saja!

1183. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:09:47]

Informasi tertulis bukan laporan.

1184. KETUA: SALDI ISRA [02:09:51]

Informasi tertulis?

1185. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:09:51]

Siap. Berbentuk surat (...)

1186. KETUA: SALDI ISRA [02:09:51]

Jadi, bukan laporan?

1187. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:09:53]

Berbentuk surat.

1188. KETUA: SALDI ISRA [02:09:54]

Berbentuk surat. Anda memahami sebagai informasi tertulis?

1189. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:09:58]

Siap.

1190. KETUA: SALDI ISRA [02:09:58]

Apa, yang dilakukan sebagai Bawaslu terkait dengan informasi itu?

1191. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:10:02]

Setelah informasi kami terima, kami melakukan pengkajian dan penelusuran, dan juga melakukan klarifikasi terhadap nama yang ada di surat.

1192. KETUA: SALDI ISRA [02:10:10]

Terus?

1193. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:10:11]

Yang bersangkutan yang kami klarifikasi yang atas nama di surat juga tidak mengetahui ke siapa dan dari mana sumber dokumen yang dilaporkan.

1194. KETUA: SALDI ISRA [02:10:15]

Oke, itu ada semuanya ya, di jawaban Bawaslu, ya?

1195. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:10:22]

Siap. Siap, Yang Mulia.

1196. KETUA: SALDI ISRA [02:10:23]

Nanti disampaikan, ya?

1197. BAWASLU: EPENDI PASARIBU [02:10:24]

Siap, Yang Mulia.

1198. KETUA: SALDI ISRA [02:10:25]

Oke, lanjut!

1199.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:10:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, informasi atau laporan, kami mendefinisikan laporan, bahwa hal ini menurut hemat kami, tidak ada statusnya diberitahukan kepada kami, para pelapor, terkait dengan laporan atau informasi yang kami berikan kepada Bawaslu, Yang Mulia.

Dan menurut kami, seharusnya itu disampaikan, dan kami menganggap bahwa ini terjadi suatu pembiaran praktik money politics di Labusel.

Yang Mulia, bahwa kemudian praktik-praktik money politics seperti kami sampaikan tadi, terjadi di seluruh Kecamatan. Kami uraikan poin-poin yang bisa kami identifikasi. money politics di wilayah Kecamatan Torgamba, itu dilakukan dengan ... oleh kandidat calon Paslon Nomor Urut 1 kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah uang Rp300.000,00 dengan amplop dan bergambar foto.

1200. KETUA: SALDI ISRA [02:11:40]

Ini yang di halaman 15, ya?

1201.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:11:42]

Halaman 9, Yang Mulia.

1202. KETUA: SALDI ISRA [02:11:42]

Oke.

1203.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:11:45]

Kemudian (...)

1204. KETUA: SALDI ISRA [02:11:47]

Kalau, yang itu-itunya sudah ya, nanti kita tinggal melihat bukti apa yang Saudara ... apa ... sampaikan ke ... semuanya kan, money politics ini ya, basisnya?

1205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:11:52]

Ya, baik, Yang Mulia.

1206. KETUA: SALDI ISRA [02:11:56]

Nah, saya mau tanya ini di halaman 15, lihat permohonan. Ini jelas terlihat dari adanya pergerakan atau pergeseran suara tidak sah yang melambung tinggi atau di luar batas yang wajar, yaitu sebanyak 43.711.000 suara, itu apa maksudnya?

1207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:12:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Ini yang ingin kami sampaikan, ada kesalahan penulisan, Yang Mulia, sebenarnya.

1208. KETUA: SALDI ISRA [02:12:27]

Oke.

1209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:12:28]

Nah, yang sebenarnya adalah 5.671 dari suara tidak sah ini. Dan ada (...)

1210. KETUA: SALDI ISRA [02:12:37]

Oke, berapa suara tidak sahnya?

1211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:12:36]

4 ... 5.671.

1212. KETUA: SALDI ISRA [02:12:39]

5.671.

1213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:12:40]

Kami pun dari D.Hasil dan Kecamatan dan Kabupaten.

1214. KETUA: SALDI ISRA [02:12:46]

Ini yang ada di sebelahnya, ya?

1215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:12:48]

Benar, Yang Mulia. Itu (...)

1216. KETUA: SALDI ISRA [02:12:49]

Bukan 43.000.000, ya?

1217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:12:50]

Bukan, Yang Mulia, salah. Kami ingin klarifikasilah.

1218. KETUA: SALDI ISRA [02:12:54]

Tetapi tidak bisa lagi, ini sudah tertulis. Apa lagi yang mau disampaikan?

1219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:12:58]

Ya. Minimal itu yang kami sampaikan, Yang Mulia.

1220. KETUA: SALDI ISRA [02:13:01]

Oke.

1221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:13:01]

Kemudian selisih dari para ... daripada D.Hasil Kecamatan, kemudian dengan D.Hasil Kabupaten, itu sejumlah 1.825.

1222. KETUA: SALDI ISRA [02:13:14]

1.000?

1223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:13:18]

1.825.

1224. KETUA: SALDI ISRA [02:13:20]

Itu selisihnya?

1225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:13:21]

Ya. Bahwa ... Yang Mulia, mungkin kami resumekan bahwa dalil kami terkait dengan money politics. Bahwa dalil ... apa ... money politics yang terjadi di seluruh kecamatan melibatkan pejabat-pejabat sampai kepala dusun.

1226. KETUA: SALDI ISRA [02:13:36]

Oke.

1227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:13:36]

Dan itu saya kira itu poin pentingnya kami.

1228. KETUA: SALDI ISRA [02:13:38]

Oke.

1229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:13:38]

Yang kemudian, itu merugikan kepentingan klien kami. Dan ada hal yang mungkin penting kami sampaikan dalam forum ini. Bahwa kami (...)

1230. KETUA: SALDI ISRA [02:13:52]

Halaman berapa itu yang mau Bapak sampaikan?

1231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:13:56]

Yang ... bahwa calon Prinsipal tidak diberikan undangan memilih.

1232. KETUA: SALDI ISRA [02:14:01]

Di halaman berapa itu?

1233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:02]

Halaman 17.

1234. KETUA: SALDI ISRA [02:14:03]

17.

1235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:04]

Angka 32, Yang Mulia.

1236. KETUA: SALDI ISRA [02:14:05]

Tidak diberikan undangan memilih, akhirnya bisa memilih atau tidak?

1237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:07]

Bisa, Yang Mulia, datang dia ke TPS langsung (...)

1238. KETUA: SALDI ISRA [02:14:10]

Ya.

1239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:11]

Baru kemudian dicek DPT-nya di TPS.

1240. KETUA: SALDI ISRA [02:14:15]

Tapi kan, Bapak tahu kan, kalau orang pun tidak ada undangan memilih, masih bisa memilih, tahu kan?

1241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:19]

Bisa.

1242. KETUA: SALDI ISRA [02:14:19]

Tahu, kan?

1243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:19]

Ya. Yang kami maksud pelayanan (...)

1244. KETUA: SALDI ISRA [02:14:23]

Oke.

1245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:25]

Kepada kami tidak setara gitu, Yang Mulia.

1246. KETUA: SALDI ISRA [02:14:29]

Lalu yang calon lain diundang memilih, begitu?

1247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:30]

Nah itu, kami tidak diundang.

1248. KETUA: SALDI ISRA [02:14:33]

Oke, lanjut.

1249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:33]

Saya kira itu kami cukupkan, Yang Mulia.

1250. KETUA: SALDI ISRA [02:14:33]

Ya, terus Petitem kalau begitu.

1251. KUASA HUKUM PEMOHON 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:34]

Petitem.

1252. KETUA: SALDI ISRA [02:14:34]

Ya.

1253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:14:35]

Izin, rekan kami yang membacakan.

1254. KETUA: SALDI ISRA [02:14:39]

Silakan.

1255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SANDI MUJI AREZA [02:14:40]

Izin Yang Mulia. Untuk Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, Pukul 17.00 WIB, serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari suatu kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (...)

1256. KETUA: SALDI ISRA [02:15:25]

Dari setiap.

1257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SANDI MUJI AREZA [02:15:26]

Ya, setiap, Yang Mulia.

1258. KETUA: SALDI ISRA [02:15:27]

Ya.

1259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SANDI MUJI AREZA [02:15:28]

Wakil Bupati dan Kabupaten Labuanbatu Selatan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Feri Saputra Simatupang dan Syahdian Purba Siboro.

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Feri Saputra Simatupang dan Sahdian Purba Siboro sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuanbatu Selatan.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Labuanbatu Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ari Wibowo dan Azwar Sazali Tanjung, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuanbatu Selatan Tahun 2024.

Atau

Memerintahkan KPU Kabupaten Labuanbatu Selatan melakukan pemungkutan ... pemungutan dan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan, dan Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuanbatu Selatan.

1260. KETUA: SALDI ISRA [02:16:32]

Jadi 3 kecamatan saja, ya?

1261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SANDI MUJI AREZA [02:16:33]

3 kecamatan, Yang Mulia.

1262. KETUA: SALDI ISRA [02:16:34]

Oke, ada lagi?

1263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SANDI MUJI AREZA [02:16:37]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia.

1264. KETUA: SALDI ISRA [02:16:41]

Oke.

1265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SANDI MUJI AREZA [02:16:41]

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia, ditandatangani.

1266. KETUA: SALDI ISRA [02:16:44]

Oke, itu alternatif *atau* itu untuk nomor berapa, Pak? Di Petikum itu.

1267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:16:52]

Alternatif atau ini untuk Nomor 3, Yang Mulia.

1268. KETUA: SALDI ISRA [02:16:56]

Untuk Nomor 3?

1269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:16:57]

Betul.

1270. KETUA: SALDI ISRA [02:16:58]

Bukan untuk Nomor 4, ya? 3 atau 4?

1271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:17:04]

Nomor 3.

1272. KETUA: SALDI ISRA [02:17:05]

Oke, ini sudah dicatat ini, Pak? Jadi alternatif Bapak itu untuk Nomor 3, ya? Oke, terima kasih.

Ada yang mau didalami, Yang Mulia Pak Ridwan?

1273. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:18]

Sedikit saja, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Kuasa Pemohon, itu yang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan itu kan sudah ada laporan ke Bawaslu.

1274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:17:31]

Benar, Yang Mulia.

1275. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:33]

Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan, tidak ... karena tidak berupa tertulis, berupa surat. Maksudnya surat seperti apa? Tidak isi blanko? Kan, itu kan ada formulir.

1276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:17:44]

Ya, baik, Yang Mulia?

1277. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:45]

Apa sebabnya?

1278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:17:45]

Jadi, seb ... ini ... sebenarnya surat, Yang Mulia. Tapi yang dimasukkan ke Bawaslu ada from ... form laporan.

1279. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:51]

Itu form yang dibuat?

1280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:17:53]

Bukan, Yang Mulia, surat.

1281. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:54]

Bukan mengisi form memang?

1282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:17:55]

Bukan mengisi form, kenapa tidak mengisi form, Yang Mulia, karena tidak ... saksinya enggak ada yang berani.

1283. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:01]

Oke, BA-Pleno Hasil tidak ditandatangani juga?

1284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:18:05]

Pleno Hasil di Kabupaten tidak ditandatangani (...)

1285. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:09]

Tidak ditandatangani.

1286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:18:10]

Ya, Yang Mulia.

1287. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:18:11]

Terima kasih.

1288. KETUA: SALDI ISRA [02:18:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Arsul?

1289. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:13]

Terima kasih, Pak Ketua Panel, sedikit nih Kuasa Pemohon, ya.

Anda mempersoalkan soal money politics di ... kalau di Posita di 4 kecamatan, ya. Ini ada berapa kecamatan, seluruhnya di Kabupaten Labusel?

1290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:18:31]

Ada 5, Yang Mulia.

1291. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:33]

Ada 5, ya? Oke,
Benar KPU? Ada 5? Betul. Oke.
Nah, tapi Anda tidak dalam Petitum Alternatif, tidak minta PSU di Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, hanya 3, ya?

1292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:18:55]

Benar ... benar, Yang Mulia.

1293. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:55]

Ya, berarti walaupun Anda persoalkan di mana ... di Posita, tapi tidak ada minta di Petitum ini, ya?

1294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:19:03]

Tidak, cukup 3 kecamatan, Yang Mulia.

1295. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:06]

Cukup 3, ini Sei Kanan dengan Sungai Kanan ini sama nih?

1296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:19:10]

Sama (...)

1297. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:10]

Karena di Posita, Anda pakai istilah Sei Kanan, di Petitum Anda pakai su ... apa ... Sungai Kanan. Saya tanya ininya.

1298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:19:24]

Sama, Yang Mulia, sama.

1299. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:25]

Nah, sei itu sungai, ya?

1300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:19:27]

Sei itu sungai.

1301. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:28]

Gitu, ya?

1302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUSSYAH RAMADANI D. [02:19:28]

Ya, Yang Mulia.

1303. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:29]

Oke, cukup, Pak Ketua.

1304. KETUA: SALDI ISRA [02:19:32]

Terima kasih. Jadi selesai ini, jatah Hak Konstitusional untuk Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya sudah selesai. Sebelum ke yang lain, ini kita ... apa dulu? Disahkan bukti-buktinya dulu, baru nanti kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, segala macam.

Untuk Kabupaten Sarolangun, Nomor 77, Kartu Advokat atas nama Fernando Donalco, Sigit Brothers, tidak ada fotokopi bagian belakang, sehingga tidak dapat terlihat masa berlakunya. Nah ini jangan, apa ini, disengaja tidak difotokopi ini, supaya tidak ... apa ... terlihat masa berlakunya. Nanti dilengkapi, ya. Kalau ternyata nanti tidak berlaku, harus segera diurus. Nanti kalau enggak, ndak bisa masuk ruang sidang lagi, tidak ada alas haknya masuk ruang sidang.

Flashdisk yang berisi permohonan awal dan daftar alat bukti awal itu rusak, enggak bisa dibaca. Jadi istilahnya disini "korak" katanya, sehingga filenya tidak dapat ditemukan. Nanti di ... di ... diperbaiki, ya.

Yang Sarolangun, tolong diperbaiki di ... apa ... dilengkapi yang ... apanya ... flashdisk yang berisi permohonan awal dan daftar alat bukti.

Sementara bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-16 dan P-E1 sampai dengan P-E2, betul? Mana Sarolangun? Sarolangun? Ya? Betul, ya? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Tadi yang diminta, tolong dilengkapi.

Kabupaten Minahasa Tenggara, Kartu Advokat atas nama Yohannes M. Muaja, dan Agus Y. Tawas, dan Wensy Wengke sudah habis masa berlakunya. Ini sama penyakit Advokat ini semuanya ini, Pak apa ... Pak Wakil Kamal, malas mengurus yang kayak-kayak begini ini. Malas. Berapa sih iuran yang harus dibayar itu? Beda-beda, ya? Masa enggak bisa kebayar dari fee Sengketa Pilkada, kan ndak masuk akal juga itu. Ya, tolong nanti dilunasi yang kayak begitu, paling tidak ada keterangan sedang mengurus perpanjangan.

Alat Bukti P-1 sampai dengan P-16, Minahasa Tenggara, ya betul? Disahkan ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Kabupaten Samosir, Perkara Nomor 214, Kartu Advokat atas nama Samuel Hutasoit sudah habis masa berlakunya. Kemudian alat Bukti P-1 sampai P-8, betul? Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian ini Kabupaten Jeneponto. Kartu Advokat atas nama Anwar, S.H., Unirsal, S.H., Dhamang, S.H., Eko, S.H., Anas Malik, S.H., M.H., Muhammad Hasrul bin Sirajudin, S.H., sudah habis masa berlakunya. Ya, nanti dilengkapi, ya. Yang penting yang diserahkan itu sudah habis masa berlakunya. Oke, nanti dilengkapi.

Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36, betul? Ini ada ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti yang dilampirkan, nanti diperbaiki.

Bukti P-10B, itu tidak sesuai.

Bukti P-11B, itu tidak sesuai. Itu tidak sesuai.

Bukti P-12, Bukti P-13A, Bukti P-23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tolong nanti diperbaiki, ya. Yang tidak bermasalah disahkan.

KETUK PALU 1X

Kabupaten Muaro Jambi 139. Ini kartu advokat atas nama Ilhamsyah dan Arie Permata sudah out of date tanggal 31 Desember. Tolong diperbaiki.

Kemudian menyerahkan bukti yang telah diverifikasi, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-741, betul?

1305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDDY YULIANSYAH [02:24:10]

Betul.

1306. KETUA: SALDI ISRA [02:24:11]

Betul, Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Bukti P-502, P-589, P-599 dikarenakan tulisan nomor TPS pada alat bukti tidak jelas, oke. Kemudian Bukti P-257, bukti 61 ... Bukti P-641, Bukti P-642 karena nama kecamat ... pada daftar alat bukti tidak sesuai dengan alat bukti, nanti disesuaikan. Kemudian Bukti P-734, dikarenakan nama pemberi pernyataan pada daftar alat bukti tidak sesuai dengan alat bukti, nanti diperbaiki ya, sepanjang yang tidak ada masalah disahkan.

KETUK PALU 1X

Permohonan sebagai Pihak Terkait. Mahkamah menerima Bambang Bayu Suseno dan Junaidi H. Mahir selaku Pasangan Calon Pemenang Pihak Terkait.

Kemudian, untuk Perkara 188 Kabupaten Fak Fak, ini yang dicabut tadi, kalau yang 144 tidak lagi, 188. Kelengkapan berkas, Kuasa Hukum belum tanda tangan pada Perbaikan Permohonan.

Tadi banyak sekali itu, termasuk yang di Perbaikan Permohonannya Pak Wakil Kamal, banyak sekali yang tidak tanda tangan. Jangan-jangan pembagiannya belum rata, jadi tidak mau tanda tangan ini.

Dan daftar alat bukti antara lain Fahri Bachmid, Agustiar, Alungsah, Julianus Halawa, Paulus Sania. Kuasa Hukum belum menyerahkan KTA antara lain Agustiar, Alungsah, Julianus Halawa. Nanti kalau tidak diserahkan, itu kita coret saja dan kita tidak akan munculkan di ... apa ... di putusan.

Kuasa Hukum habis masa waktu berlakunya Pak Fahri Bachmid, tolong sampaikan itu. Mana ada beliau enggak di sini? Nanti ... apa namanya ... karena sibuk mengurus partai, lupa mengurus KTA itu. Pengesahan bukti ya, alat bukti yang di ... telah diverifikasi dan akan disahkan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-123, kecuali Bukti P-111B karena nomor laporan Bawaslu pada alat bukti tidak jelas. Oke, nanti diperbaiki ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kabupaten Mimika, Kuasa Hukum habis masa berlaku KTA di tahun 2024 antara lain Delvi, Khaidir, Julianto, Rendy Saputra, dan Christoforus, itu habis.

Bukti, alat bukti yang telah diserahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-55, kecuali Alat Bukti Nomor P-23, P-28 sampai P-29, P-30A sampai dengan P-33, P-34A sampai dengan P-3 ... P-46, P-48 sampai dengan P-54 belum diserahkan ke Mahkamah, betul?

1307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:27:35]

Betul, Yang Mulia.

1308. KETUA: SALDI ISRA [02:27:36]

Oke, jadi yang sudah diserahkan, disahkan.

KETUK PALU 1X

Mimika 272, Bukti P-1 sampai P-77, betul?

Ini catatan atas nama Jabir Letsoin dan Billklovin Nahason Erubun belum tanda tangan di Surat Kuasa. Ada penjelasan?

1309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [02:28:12]

Mungkin untuk sementara dicoret saja, Yang Mulia. Karena ada di (...)

1310. KETUA: SALDI ISRA [02:28:15]

Sementara atau permanen?

1311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [02:28:16]

Ya, permanen (...)

1312. KETUA: SALDI ISRA [02:28:16]

Ya.

1313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [02:28:17]

Karena di ... di Papua, Yang Mulia.

1314. KETUA: SALDI ISRA [02:28:20]

Oke, kalau begitu dicoret, ya.

Kuasa Pemohon atas nama Anwarsyah Tarigan, Riky Rizkian Harahap, Hasan Daniel, Simon Kasamol, Suprianto Teguh Sukma, Jabir Letsoin, Bilklovin Nahason Erubun, Jessica Clartje, dan Fadly Yawan belum tanda tangan di berkas Perbaikan Permohonan, itu yang banyak tadi, Pak. Segera, ya? Atau dicoret?

1315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [02:28:46]

Kalau dalam waktu beberapa hari tidak ditandatangani, ya, dicoret, Yang Mulia.

1316. KETUA: SALDI ISRA [02:28:50]

Bagaimana kami itu? Pak Wakil Kamal, macam saja akal nya ini.

1317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [02:28:55]

Di ... dicoret saja, Yang Mulia. Karena (...)

1318. KETUA: SALDI ISRA [02:28:55]

Oke, dicoret, itu kan (...)

1319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [02:28:56]

Agak (...)

1320. KETUA: SALDI ISRA [02:28:56]

Pasti (...)

1321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [02:28:58]

Banyak, Yang Mulia, ya.

1322. KETUA: SALDI ISRA [02:28:59]

Ini soal pembagian, ya, urusan Pak Wakil Kamal lah, begitu.

Oke, KTA Kuasa Hukum, ini sudah habis masa berlakunya, ya. Arwansyah Tarigan, Mirza Zulkarnaen, Siti Fatonah Nur Hidayah, Riky Rizkian Harahap, Hasan Daniel, Ali Syariati, Bilklovin Nahason Erubun, sudah habis masa berlakunya.

Kemudian, KTA Kuasa Pihak Terkait atas nama Juhari Immanuel Baru Kurniawan perlu dilengkapi. Nah, Bukti P-1 sama dengan Bukti P-77 disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, Labuhanbatu Selatan.

Bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-15. Betul? Betul. Tapi catatannya, Bukti P-5 sampai dengan P-15 belum dileges, Pak. Tolong dileges, ya. Oke, berarti yang kita sahkan P-1 sampai dengan P-4.

KETUK PALU 1X

KTA Kuasa atas nama Agussyah Ramadani Damani, Tri Sandi Muji Areza, Aidil A. Aditya, dan Juliadi, sudah habis masa berlakunya.

KTA Kuasa Pihak Terkait atas nama Sonang Basri Hasibuan, sudah habis masa berlakunya. Terdapat perbedaan jumlah Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam Permohonan tujuh orang, dan dalam Surat Kuasa sepuluh orang, yaitu Rahmat Nasution, Sonang Basri Hasibuan, dan Muhammad Saleh Pohan. Nah, ini beda ini antara yang ada di ... nanti tolong dirapikan, ya.

Cukup? Ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan! Sebelum itu diberi tahu, kalau ada yang mau melakukan inzage dipersilakan, setelah mengajukan Permohonan, itu bisa dilakukan di Gedung 1, di gedung utama, mulai dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 16.00 sore. Tidak boleh dikopi, difoto, dan segala macamnya. Yang boleh diperbanyak itu, memang daftar Alat Bukti, tapi kalau alat buktinya tidak boleh. Paham, ya, semua? Silakan! Satu.

Bapak, apa?

**1323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:31:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1324. KETUA: SALDI ISRA [02:31:18]

Ya.

**1325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:31:21]**

Saya Yuskandar, Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, Perkara 77,
Kabupaten Sarolangun.

1326. KETUA: SALDI ISRA [02:31:25]

Ya.

**1327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:31:26]**

Yang pertama, kami akan mengajukan inzage, Yang Mulia.

1328. KETUA: SALDI ISRA [02:31:28]

Ya, kan sudah diizinkan tadi, Pak.

**1329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:31:30]**

Ya.

1330. KETUA: SALDI ISRA [02:31:31]

Apa lagi?

**1331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:31:33]**

Yang kedua, tadi Pemohon tidak membacakan seluruhnya
masalah tenggang waktu, Yang Mulia.

1332. KETUA: SALDI ISRA [02:31:36]

Ya.

1333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:31:37]

Jadi kami, supaya jelas, khawatirnya tidak sama dengan yang ada dengan kami, Yang Mulia.

1334. KETUA: SALDI ISRA [02:31:40]

Bapak, saya sudah (...)

1335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:31:40]

Mohon dibacakan (...)

1336. KETUA: SALDI ISRA [02:31:41]

Ingatkan, semua yang tertulis itu yang jadi pedoman, ya. Yang ada di Perbaikan Permohonan, oke. Itu berlaku untuk semuanya. Apa lagi?

1337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:31:52]

Mohon dibacakan, Yang Mulia.

1338. KETUA: SALDI ISRA [02:31:54]

Apanya yang mau dibacakan, Pak?

1339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:31:56]

Tenggang waktu peram ... penyampaian Permohonan.

1340. KETUA: SALDI ISRA [02:31:57]

Bukan, Bapak jawab, enggak di sini Bapak, Bapak kan ada waktu nanti, ya.

**1341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [02:32:01]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

1342. KETUA: SALDI ISRA [02:32:02]

Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Pak.

**1343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:32:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1344. KETUA: SALDI ISRA [02:32:07]

Ya.

**1345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:32:08]**

Denny Kaunang, Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 1
Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara atas nama (...)

1346. KETUA: SALDI ISRA [02:32:18]

Oke.

**1347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:32:19]**

Ronald Kandoli, Freddy Tuda.

1348. KETUA: SALDI ISRA [02:32:20]

Ya. Apa, Pak, yang mau disampaikan, Pak?

**1349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:32:21]**

Yang mencapai suara 55,1%, menyatakan keberatan atas pencabutan yang sebelumnya sudah ada pencabutan tertulis.

1350. KETUA: SALDI ISRA [02:32:29]

Bapak nanti jawab, ada kesempatan Bapak menjawab. Ya?

**1351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:32:32]**

Ya.

1352. KETUA: SALDI ISRA [02:32:33]

Oke.

**1353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:32:34]**

Terima kasih.

1354. KETUA: SALDI ISRA [02:32:35]

Faktanya sudah kami sampaikan, nanti tergantung Bapak.

**1355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:32:36]**

Ya.

1356. KETUA: SALDI ISRA [02:32:37]

Oke. Ada lagi yang lain?

**1357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY FRANKIE KAUNANG
[02:32:38]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1358. KETUA: SALDI ISRA [02:32:40]

Di sini habis? Di sini. Dari mana, Bu?

1359. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [02:32:45]

Dari KPU Kabupaten Sarolangun, Yang Mulia.

1360. KETUA: SALDI ISRA [02:32:48]

KPU Sarolangun, silakan.

1361. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [02:32:50]

Izin mau melengkap KTA yang belum lengkap saja, Yang Mulia.

1362. KETUA: SALDI ISRA [02:32:53]

Nanti diserahkan, ya.

1363. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [02:32:54]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

1364. KETUA: SALDI ISRA [02:32:56]

Ada yang lain? Cukup? Nah, itu.

Dari Bawaslu? Ini Bawaslu kalau enggak ada komandannya diam-diam.

Nah, sekarang kami sampaikan poin penting. Tolong jawab apa yang didalilkan oleh Termohon dan Bawaslu tolong terangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan atau berkaitan dengan dalil itu. Begitu juga Pihak Terkait, jangan menjelaskan hal-hal yang tidak dipersoalkan. Jadi jangan menggaruk yang tidak gatal. Paham itu, ya? Nanti tergaruk yang tidak tepat, susah nanti.

Jadi kalau dia mempersoalkan ini, dijelaskan, dijawab atau dibantah oleh Termohon. Supaya nanti fakta-fakta itu kami bisa lihat secara utuh dan didukung oleh bukti-bukti. Karena yang akan dilihat nanti buktinya semua. Cukup?

Kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk semua Permohonan, 10 Permohonan kurang 1 yang tadi ditarik dari Kabupaten Fak Fak. Dan kami berterima kasih atas sikap kita yang kooperatif dan saling menghargai satu sama lainnya. Walaupun kadang-kadang saya harus suaranya tinggi segala macam, itu kan teknis Hakim saja. Supaya ini para lawyer kalau dibiarkan semauanya, dia sekehendak hatinya, makanya harus diintimidasi juga mereka itu. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Permohonan Pemohon untuk Perkara 77, 86, 214, 232, 139, 188, 256, 272, 33 PHPU Bupati Tahun 2025 selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.31 WIB

Jakarta, 14 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

